



**PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PADA KOPERASI PEGAWAI
REPUBLIK INDONESIA (KPRI) IKHWAN DI KOTA PAYAKUMBUH
2012 - 2016**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar*

Disusun oleh :

**Desi Rawani Sagala
NIM 13 231 016**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
KONSENTRASI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2018**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Desi Rawani Sagala**

Nim : 13 231 016

Tempat/tanggal lahir : Kota Pinang / 27 Desember 1995

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Akuntansi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Penilaian Tingkat Kesehatan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kota Payakumbuh”** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat, kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan semestinya.

Batusangkar, 05 Februari 2018

Saya yang Menyatakan,



Desi Rawani Sagala
NIM. 13 231 016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **DESI RAWANI SAGALA**, NIM 13 231 016 dengan judul: **“PENILAIN TINGKAT KESEHATAN pada KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) IKHWAN di KOTA PAYAKUMBUH**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *Munaqasyah*

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, Februari 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II

Elfina Yenti, SE., Akt., M. Si., CA.
NIP. 19740623 200003 2 002

Sri Adella Fitri, SE., M. Si.
NIP. 19830713 200604 2 002

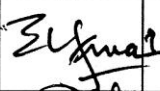

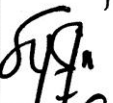

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar



PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama DESI RAWANI, NIM: 13 231 098, Judul: **PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) IKHWAN KOTA PAYAKUMBUH 2012 - 2016**, Telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2018.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal
1	Elfina Yenti, SE.,Akt.,M.Si. CA NIP.19740623 200003 2 002	Ketua Sidang/ Pembimbing I		5/3 2018
2	Sri Adella Fitri, SE.,M.Si. NIP. 19830713 200604 2 002	Pembimbing II/ Penguji IV		2/3 2018
3	Dr. H. SyukriIska, M. Ag NIP. 19631019 199203 1 004	Penguji I		07/03 2018
4	Nita Fitria, SEI., MA NIP.-	Penguji II		23/2/18

Batusangkar, Februari 2018

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam



Ulya Atsani, S.H.,M.Hum
NIP.19750303 199903 1 004

ABSTRAK

Desi Rawani Sagala. NIM, 13 231 016 judul skripsi “Penilaian Tingkat Kesehatan Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Ikhwan Di Kota Payakumbuh 2012 - 2016”. Program Studi Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam Skripsi ini adalah karena pada USP KPRI Ikhwan Kota Payakumbuh dari periode ke periode mengalami naik turun atau fluktuasi dalam Laporan Keuangannya dan koperasi ini belum pernah melakukan penilaian kesehatan, sehingga perkembangan dari koperasi tersebut belum diketahui. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat kesehatan KPRI Ikhwan Kota Payakumbuh yang dilihat dari 7 aspek yaitu Aspek permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuhan, Jati diri koperasi berdasarkan atas penilaian Kesehatan yang mengacu pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6.IV/2016.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat Deskriptif Kuantitatif yaitu pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kota Payakumbuh, untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui kuesioner dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data (laporan keuangan) yang ada di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Ikhwan Kota Payakumbuh.

Subjek penelitian ini adalah USP KPRI Ikhwan Kota Payakumbuh dan objek penelitian ini adalah Penilaian Tingkat Kesehatan USP KPRI Ikhwan Kota Payakumbuh yang menyangkut aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jati diri koperasi yang mengacupada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6.IV/2016.

Hasil penelitian dari penilaian tingkat kesehatan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Ikhwan Kota Payakumbuh yang telah dilakukan untuk penilain tingkat kesehatan koperasi pada tahun 2012 - 2015 dinyatakan memperoleh predikat Cukup Sehat dan pada tahun 2016 memperoleh predikat Dalam Pengawasan. Tahun 2012 dinyatakan memperoleh predikat Cukup Sehat dengan skor 72,40%, pada tahun 2013 dinyatakan memperoleh predikat Cukup Sehat dengan skor 70,50% 2014 Cukup Sehat dengan skor akhir 60,10% dan 2015 dinyatakan memperoleh predikat Cukup Sehat dengan skor akhir 68,70%. Pada tahun 2016 dinyatakan memperoleh predikat Dalam Pengawasan dengan skor akhir 62. 70%.

Kata Kunci: Tingkat Kesehatan, Aspek Penilaian Koperasi USP (Unit Simpan Pinjam)

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

ABSTRAK i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL..... iv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 6

C. Batasan Masalah 7

D. Perumusan Masalah..... 7

E. Tujuan Penelitian..... 7

F. Manfaat Penelitian..... 8

G. Defenisi operasional Variabel 9

BAB II LANDASAN TEORI 11

A. Koperasi..... 11

1. Pengertian Koperasi 11

2. Jenis – jenis Koperasi 12

3. Prinsip – prinsip Koperasi..... 13

4. Fungsi Koperasi Indonesia..... 14

5. Tujuan Koperasi..... 15

B. Penilaian Kesehatan Koperasi 15

C. Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan
Pinjam Koperasi 17

1. Permodalan 17

2. Kualitas aktiva Produktif 20

3. Manajemen..... 23

4. Efesiensi..... 27

5. Likuiditas 30

6. Kemandirian Dan Pertumbuhan.....	32
7. Jati Diri Koperasi	34
D. Penelitian Yang Relevan	36
E. Kerangka Berpikir	38
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Waktu dan Tempat Penelitian	48
C. Sumber Data	48
D. Teknik Analisis Data	49
E. Penetapan Kesehatan Koperasi.....	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	54
A. SEJARAH KOPERASI	54
B. ANALISIS DATA.....	56
BAB V PENUTUP	114
A. KESIMPULAN	114
B. SARAN.....	118
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Total Pendapatan, Aset, Laba/SHU, Kewajiban dan Modal USP Koperasi Pegawai Republik Indonesia KPRI Ikhwan Tahun 2012-2016.....	5
Tabel 2.1 Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset	19
Tabel 2.2 Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman yang Berisiko Diberikan	20
Tabel 2.3 Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri	21
Tabel 2.4 Standar Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan	22
Tabel 2.5 Standar Perhitungan RPM	23
Tabel 2.6 Standar Perhitungan Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah	24
Tabel 2.7 Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko.....	24
Tabel 2.8 Standar Perhitungan Manajemen Umum	26
Tabel 2.9 Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan.....	27
Tabel 2.10 Standar Perhitungan Manajemen Permodalan	27
Tabel 2.11 Standar Perhitungan Manajemen Aktiva	28
Tabel 2.12 Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas	29
Tabel 2.13 Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto	30
Tabel 2.14 Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor.....	32
Tabel 2.15 Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan.....	32
Tabel 2.16 Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar.....	33
Tabel 2.17 Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima	34
Tabel 2.18 Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas Asset	35
Tabel 2.19 Standar Perhitungan untuk Rasio Rentabilitas Modal Sendiri.....	36
Tabel 2.20 Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional.....	36
Tabel 2.21 Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto	38
Tabel 2.22 Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota	39
Tabel 3.1 Tolak Ukur Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP	48
Tabel 4.1 Data Modal Sendiri dan Total Aset KPRI Ikhwan tahun 2012-2016.....	52
Tabel 4.2 Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset.....	53
Tabel 4.3 Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset Tahun 2012-2016.....	54
Tabel 4.4 Penskoran Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset Tahun 2012-2016	54
Tabel 4.5 Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko.....	55
Tabel 4.6 Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko Tahun 2012-2016	56
Tabel 4.7 Penskoran Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko Tahun 2012-2016	56

Tabel 4.8 Perhitungan Modal Tertimbang KPRI Ikhwan Tahun 2012	57
Tabel 4.9 Perhitungan Modal Tertimbang KPRI Ikhwan Tahun 2013	58
Tabel 4.10 Perhitungan Modal Tertimbang KPRI Ikhwan Tahun 2014.....	58
Tabel 4.11 Perhitungan Modal Tertimbang KPRI Ikhwan Tahun 2015.....	59
Tabel 4.12 Perhitungan Modal Tertimbang KPRI Ikhwan Tahun 2016.....	59
Tabel 4.13 Perhitungan ATMR KPRI Ikhwan Tahun 2012	60
Tabel 4.14 Perhitungan ATMR KPRI Ikhwan Tahun 2013	60
Tabel 4.15 Perhitungan ATMR KPRI Ikhwan Tahun 2014	61
Tabel 4.16 Perhitungan ATMR KPRI Ikhwan Tahun 2015	61
Tabel 4.17 Perhitungan ATMR KPRI Ikhwan Tahun 2016	61
Tabel 4.18 Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri.....	62
Tabel 4.19 Perhitungan Rasio Modal Sendiri Tertimbang terhadap ATMR KPRI Ikhwan Tahun 2012-2016.....	63
Tabel 4.20 Penskoran Rasio Modal Sendiri Tertimbang terhadap ATMR KPRI Ikhwan Tahun 2012-2016	63
Tabel 4.21 Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman KPRI Ikhwan tahun 2012- 2016	64
Tabel 4.22 Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Volume Pinjaman KPRI Ikhwan Tahun 2012-2016.....	64
Tabel 4.23 Standar Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan	64
Tabel 4.24 Penskoran Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan KPRI Ikhwan Tahun 2012-2016.....	65
Tabel 4.25 Standar Perhitungan RPM.....	66
Tabel 4.26 Perhitungan Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman Diberikan KPRI Ikhwan Tahun 2012-2016.....	66
Tabel 4.27 Penskoran Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman Diberikan KPRI Ikhwan Tahun 2012-2016	66
Tabel 4.28 Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah KPRI Ikhwan Tahun 2012-2016	67
Tabel 4.29 Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah KPRI Ikhwan Tahun 2012-2016	68
Tabel 4.30 Standar Perhitungan Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah.....	68
Tabel 4.31 Penskoran Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah KPRI Ikhwan Tahun 2012-2016	69
Tabel 4.32 Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan KPRI Ikhwan Tahun 2012-2016	70
Tabel 4.33 Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan	70
Tabel 4.34 Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan KPRI Ikhwan Tahun 2012-2016	70
Tabel 4.35 Penskoran Rasio Pinjaman Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan KPRI Ikhwan Tahun 2012-2016	71
Tabel 4.36 Standar Perhitungan Manajemen Umum	72

Tabel 4.37 Penskoran Manajemen Umum KPRI Ikhwan Tahun 2012-2016.....	72
Tabel 4.38 Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan	73
Tabel 4.39 Penskoran Manajemen Kelembagaan KPRI Ikhwan Tahun 2012-2016	73
Tabel 4.40 Standar Perhitungan Manajemen Permodalan	74
Tabel 4.41 Penskoran Manajemen Permodalan KPRI Ikhwan Tahun 2012-2016	74
Tabel 4.42 Standar Perhitungan Manajemen Aktiva	75
Tabel 4.43 Penskoran Manajemen Aktiva KPRI Ikhwan Tahun 2012-2016.....	75
Tabel 4.44 Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas	76
Tabel 4.45 Penskoran Manajemen Likuiditas KPRI Ikhwan Tahun 2012-2016.....	76
Tabel 4.46 Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto KPRI Ikhwan Tahun 2012-2016	77
Tabel 4.47 Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto KPRI Ikhwan Tahun 2012-2016	77
Tabel 4.48 Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto	78
Tabel 4.49 Penskoran Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto KPRI Ikhwan Tahun 2012-2016.....	78
Tabel 4.50 Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor KPRI Ikhwan Tahun 2012-2016.....	79
Tabel 4.51 Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor KPRI Ikhwan Tahun 2012-2016	79
Tabel 4.52 Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor.....	79
Tabel 4.53 Penskoran Rasio Beban Usaha terhadap SHU KPRI Ikhwan Tahun 2012-2016	80
Tabel 4.54 Rasio Efisiensi Pelayanan KPRI Ikhwan Tahun 2012-2016	80
Tabel 4.55 Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan KPRI Ikhwan Tahun 2012-2016	81
Tabel 4.56 Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan.....	81
Tabel 4.57 Penskoran Rasio Efisiensi Pelayanan KPRI Ikhwan Tahun 2012-2016	82
Tabel 4.58 Rasio Kas KPRI Ikhwan Tahun 2012-2016.....	83
Tabel 4.59 Perhitungan Rasio Kas KPRI Ikhwan Tahun 2012-2016	83
Tabel 4.60 Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar.....	84
Tabel 4.61 Penskoran Rasio Kas KPRI Ikhwan Tahun 2012-2016.....	84
Tabel 4.62 Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima KPRI Ikhwan Tahun 2012-2016.....	85
Tabel 4.63 Perhitungan Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima KPRI Ikhwan Tahun 2012-2016	85
Tabel 4.64 Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima	86

Tabel 4.65 Penskoran Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima KPRI Ikhwan Tahun 2012-2016	86
Tabel 4.66 Data Keuangan KPRI Ikhwan Tahun 2012-2016	87
Tabel 4.67 Perhitungan Rasio Rentabilitas Asset KPRI Ikhwan Tahun 2012-2016.....	87
Tabel 4.68 Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas Asset	88
Tabel 4.69 Penskoran Rasio Rentabilitas Asset KPRI Ikhwan Tahun 2012-2016	88
Tabel 4.70 Data Keuangan KPRI Ikhwan Tahun 2012-2016	89
Tabel 4.71 Perhitungan Rentabilitas Modal Sendiri Tahun 2012-2016.....	89
Tabel 4.72 Standar Perhitungan untuk Rasio Rentabilitas Modal Sendiri.....	90
Tabel 4.73 Penskoran Rentabilitas Modal Sendiri KPRI Ikhwan Tahun 2012-2016	90
Tabel 4.74 Data Keuangan KPRI Ikhwan Tahun 2012-2016	91
Tabel 4.75 Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan Tahun 2012-2016	91
Tabel 4.76 Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional.....	92
Tabel 4.77 Penskoran Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan KPRI Ikhwan Tahun 2012-2016	92
Tabel 4.78 Data Keuangan KPRI Ikhwan Tahun 2012-2016	93
Tabel 4.79 Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto Tahun 2012-2016.....	93
Tabel 4.80 Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto	94
Tabel 4.81 Penskoran Rasio Partisipasi Bruto KPRI Ikhwan Tahun 2012-2016.....	94
Tabel 4.82 Data Keuangan KPRI Ikhwan Tahun 2012-2016	95
Tabel 4.83 Perhitungan Rasio PEA (Partisipasi Ekonomi Anggota) Tahun 2012-2016.....	95
Tabel 4.84 Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota	96
Tabel 4.85 Penskoran Rasio PEA (Promosi Ekonomi Anggota) KPRI Ikhwan Tahun 2012-2016	96
Tabel 4.86 Rangkuman Penilaian Kinerja (KPRI) Ikhwan Tahun 2012-2016.....	97
Tabel 4.87 Tolak Ukur Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP	97
Tabel 4.89 Penetapan Kesehatan KPRI Ikhwan Tahun 2012-2016.....	99

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran seorang. Dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat kemampuan ekonomi terbatas, maka pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan - perkumpulan koperasi. Bahkan Pemerintah secara langsung membantu menumbuhkan, memelihara, mendorong dan membina koperasi-koperasi. (Panji Anoranga, Ninik Widiyanti, 2007: 6)

Koperasi sangat membantu usaha kecil dan menengah dalam memenuhi permodalannya. Dengan terpenuhi modal usaha tersebut maka usahanya dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Jika tidak ada koperasi maka usanya akan berhenti atau tidak bisa berkembang sehingga ekonomi masyarakat menjadi lumpuh. Dengan demikian koperasi merupakan sokongan perekonomian rakyat berdasarkan atas kekeluargaan. Unsur koperasi merupakan tolong menolong, kerjasama dan saling menutupi kebutuhan yang mana terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 2 yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan*

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Nilai dan prinsip yang mendasari kegiatan koperasi salah satunya yaitu tolong menolong seperti yang dimaksudkan ayat di atas. Tolong menolong dalam hal ini yaitu memberikan pinjaman untuk dijadikan modal sebagai syarat untuk memulai suatu usaha.

Salah satu alat yang dipakai untuk mengetahui kondisi keuangan dalam hal ini yaitu tingkat kesehatan suatu perusahaan yang berwujud laporan keuangan dan disusun pada akhir periode yang berisi pertanggung jawaban dalam bidang keuangan atas berjalannya suatu usaha. Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Seperti yang diketahui bahwa laporan keuangan merupakan kewajiban setiap perusahaan untuk membuat dan melaporkan pada suatu periode tertentu. Apa yang dilaporkan kemudian dianalisis, sehingga dapat diketahui kondisi dan posisi perusahaan terkini. Dengan melakukan analisis akan diketahui letak kelemahan dan kekuatan perusahaan. Laporan keuangan juga akan menentukan langkah apa yang akan dilakukan perusahaan sekarang dan kedepan, dengan melihat berbagai persoalan yang ada, baik kelemahan maupun kekuatan yang dimilikinya. Disamping itu juga untuk memanfaatkan peluang yang ada dan menghadapi atau menghindari ancaman yang mungkin timbul sekarang dan dimasa yang akan mendatang. (Kasmir, 2010: 66)

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. Sedangkan Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP Koperasi) adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Perwujudan dari kesungguhan KSP atau USP dalam mengelola dana masyarakat adalah dengan menjaga kesehatan kinerjanya karena kesehatan kinerja sangat penting bagi suatu lembaga usaha. Dengan mengetahui tingkat kesehatan usaha, masyarakat (anggota) dapat dengan mudah menilai kinerja lembaga tersebut. Oleh karena itu, dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil Menengah Nomor: 06/Per/Dep.6/ IV/2016 tentang

Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam, Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Penilaian atas kesehatan keuangan dan non keuangan didasarkan pada tujuh asas koperasi, indikator penilaian yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan perumbuhan, serta jati diri koperasi.

(Praturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil Menengah Nomor: 06/Per/Dep.6/ IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam).

1. Aspek Permodalan

Modal sendiri adalah jumlah dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karekteristik sama dengan simpanan wajib, hibah, cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha dan dalam kaitannya dengan penilaian kesehatan dapat ditambahkan dengan maksimal 50% modal penyertaan.

2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Aktiva produktif adalah kekayaan koperasi yang mendatangkan penghasilan bagi koperasi yang bersangkutan.

3. Aspek Manajemen

Manajemen koperasi adalah suatu proses untuk mencapai tujuan melalui usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Untuk mencapai tujuan koperasi, perlu diperhatikan adanya sistem manajemen yang baik, agar tujuannya berhasil, yaitu dengan diterapkannya fungsi-fungsi manajemen.

4. Aspek Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan.

5. Aspek Likuiditas

Likiuditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban financial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia.

6. Aspek Kemandirian Dan Pertumbuhan

Kemandirian dan pertumbuhan koperasi merujuk pada bagaimana kemampuan koperasi dalam melayani masyarakat secara mandiri dan seberapa besar pertumbuhan koperasi di tahun yang bersangkutan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Aspek Jati Diri Koperasi.

Penilaian aspek jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota.

Dan salah satu koperasi yang menjalankan kegiatan Unit Simpan Pinjam adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Ikhwan di Kota Payakumbuh. Koperasi ini bergerak pada kegiatan Unit Simpan Pinjam dan waserda. Koperasi Pegawai Republik Indonesia Ikhwan merupakan salah satu koperasi milik pemerintah yaitu KPRI Ikhwan Kementerian Agama Kota Payakumbuh/Kabupaten Lima Puluh Kota. KPRI Ikhwan Kementerian Agama Kota Payakumbuh merupakan koperasi Unit Simpan Pinjam yang memberikan pelayanan jasa simpan pinjam kepada anggota koperasi maupun masyarakat Kota Payakumbuh dan melakukan kegiatan usaha berupa simpan pinjam.

Penilaian tingkat kesehatan pada koperasi sangat bermanfaat untuk memberikan gambaran mengenai kondisi koperasi itu sendiri kepada pihak - pihak yang berkepentingan, terutama bagi anggota koperasi dan pengelola. Selain itu, penilaian tingkat kesehatan koperasi juga dilakukan agar koperasi dapat melakukan penilaian serta mengetahui beberapa masalah dalam pelaksanaan usahanya, seperti masalah keuangan yang terjadi di KPRI Ikhwan ini yaitu jika dilihat dari laporan keuangannya dari tahun 2012 – 2016 mengalami perubahan pada kinerja keuangannya. Berikut adalah mengenai Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Ikhwan di Kota Payakumbuh Tahun 2012- 2016.

Tabel 1.1
Laporan Keuangan KPRI Ikhwan 2012 – 2016

		Aset	Modal	Kewajiban	Pendapatan	SHU
1	012	7.006.283.260	.751.245.681	.147.634.733	72.624.728	07.402.846
2	013	7.150.705.948	.283.911.021	.758.831.939	98.473.584	07.962.988
3	014	6.707.349.595	.812.771.180	.763.072.468	22.514.937	31.505.947
4	015	6.433.856.941	.812.651.444	.621.205.497	45.791.158	36.269.632
5	016	6.524.123.247	.232.643.245	.291.480.002	55.905.790	5.620.455

Sumber: Data Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Ikhwan di Kota Payakumbuh Tahun 2012 – 2016.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa aset pada tahun 2012 - 2013 mengalami peningkatan sebesar Rp. 144.422.688, pada tahun 2013-2014 mengalami penurunan sebesar Rp. 443.356.353, pada tahun 2014-2015 mengalami penurunan sebesar Rp. 273.492.654, dan pada tahun 2015-2016 mengalami peningkatan sebesar Rp. 90.266.306. Penurunan yang paling besar yaitu pada tahun 2013 - 2014 sebesar Rp. 443.356.353. Dilihat dari segi pendapatan pada tahun 2012-2013 mengalami peningkatan sebesar Rp. 25.848.856, pada tahun 2013-2014 mengalami penurunan sebesar Rp. 75.958.647, pada tahun 2014-2015 mengalami penurunan sebesar Rp. 76.723.779, dan pada tahun 2015 - 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp. 10.114.632. SHU pada tahun 2012 - 2013 mengalami peningkatan sebesar Rp. 560.142, pada tahun 2013-2014 mengalami peningkatan sebesar Rp. 23.542.959, pada tahun 2014-2015 mengalami peningkatan sebesar Rp. 4.763.685, pada tahun 2015-2016 mengalami penurunan sebesar Rp.40.649.177. Penurunan yang paling besar yaitu pada tahun 2015-2016 sebesar Rp. 40.649.177.

Berdasarkan data keuangan di atas, menyebabkan bahwas kondisinya terlihat fluktuatif, untuk menilai kesehatan suatu koperasi tidak dapat dilihat hanya dari sisi fluktuatif itu saja, melainkan dilihat juga dari non keuangannya, dimana non keuangan tersebut contohnya penilaian yang dilakukan pada manajemen KPRI. Dimana untuk penilaian kesehatan suatu

KSP dan USP Koperasi telah dikeluarkan oleh Pemerintah yaitu Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi yang telah membuat sistem penilaian terhadap KPRI yang mencakup 7 aspek yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, aspek jati diri koperasi. Penilaian tingkat kesehatan koperasi berperan penting terhadap bagaimana cara mengetahui kinerja koperasi dan tingkat kesehatannya, sehingga manajer dapat mengambil suatu keputusan yang tepat untuk menjaga kelangsungan hidupnya dan penilaian kesehatan dilakukan sekali dalam setahun.

Alasan mendasar Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Ikhwan dijadikan Objek penelitian karena penulis ingin melakukan penilaian kesehatan dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam di KPRI Ikhwan Kota Payakumbuh, agar diketahui apakah Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Ikhwan dalam kondisi sehat atau tidak sehatnya. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian pada KPRI Ikhwan yang berjudul tentang **“Penilaian Tingkat Kesehatan Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Ikhwan di Kota Payakumbuh 2012 - 2016 “**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi sebagai berikut:

1. Kinerja Keuangan Koperasi Jasa Keuangan dilihat dari aspek Permodalan
2. Kinerja Keuangan Koperasi Jasa Keuangan dilihat dari aspek kualitas aktiva produktif.
3. Kinerja Keuangan Koperasi Jasa Keuangan dilihat dari aspek manajemen.

4. Kinerja Keuangan Koperasi Jasa Keuangan dilihat dari aspek efisiensi.
5. Kinerja Keuangan Koperasi Jasa Keuangan dilihat dari aspek likuiditas.
6. Kinerja Keuangan Koperasi Jasa Keuangan dilihat dari aspek kemandirian dan pertumbuhan
7. Kinerja Keuangan Koperasi Jasa Keuangan dilihat dari aspek Jati diri koperasi
8. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kinerja keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kota Payakumbuh

C. Batasan Masalah

Dari permasalahan yang diidentifikasi dari latar belakang dan identifikasi masalah, agar permasalahan menjadi jelas dan terpusat serta tujuan dapat tercapai, penelitian ini dibatasi pada masalah kesehatan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Ikhwan tahun 2012-2016 dilihat dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jati diri koperasi.

D. Perumusan Masalah

Dari batasan masalah di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah tingkat kesehatan koperasi pegawai republik indonesia (KPRI) Ikhwan di Kota Payakumbuh dari tahun 2012 – 2016 dilihat dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jati diri koperasi ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kesehatan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Ikhwan di kota Payakumbuh yang dilihat dari aspek permodalan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kesehatan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Ikhwan di Kota Payakumbuh yang dilihat dari Aspek Kualitas Aktiva Produktif.

3. Untuk mengetahui bagaimana tingkat Kesehatan Koperasi Pegawai Republik Indonesi (KPRI) Ikhwan di Kota Payakumbuh yang dilihat dari Aspek Manajemen.
4. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kesehatan Koperasi Pegawai Republik Indonesi (KPRI) Ikhwan di Kota Payakumbuh yang dilihat dari Aspek Efisiensi.
5. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kesehatan Koperasi Pegawai Republik Indonesi (KPRI) Ikhwan di Kota Payakumbuh yang dilihat dari Aspek Likuiditas.
6. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kesehatan Koperasi Pegawai Republik Indonesi (KPRI) Ikhwan di Kota Payakumbuh yang dilihat dari Aspek Kemandirian Dan Pertumbuhan.
7. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kesehatan Koperasi Pegawai Republik Indonesi (KPRI) Ikhwan di Kota Payakumbuh yang dilihat dari Aspek Jati Diri Koperasi.

F. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis
 - a. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Serjana Ekonomi pada jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
 - b. Untuk mengetahui aplikasi ilmu yang diperoleh secara teoritis serta menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam hal praktek-praktek yang dilakukan perusahaan secara nyata, terutama menyangkut masalah “ Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Unit Simpan Pinjam“
2. Bagi Koperasi sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi kinerja dalam menjaga kesehatan Koperasi.

3. Bagi pihak akademik sebagai tambahan wacana akademik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar dan sebagai dasar pedoman untuk peneliti selanjutnya.

G. Defenisi operasional Variabel

Variable dalam penelitian ini adalah Tingkat Kesehatan KPRI Ikhwan Kota Payakumbuh, yang dimaksud Tingkat Kesehatan KPRI Ikhwan disini adalah kondisi atau keadaan KPRI Ikhwan yang dinyatakan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Tingkat kesehatan KPRI Ikhwan dapat diketahui berdasarkan perhitungan laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016. Dimana penilaian tersebut dilihat dari 7 aspek yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jati diri koperasi.

Defenisi variabel dari penelitian ini adalah:

1. Aspek Permodalan

Modal sendiri adalah jumlah dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karekteristik sama dengan simpanan wajib, hibah, cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha dan dalam kaitannya dengan penilaian kesehatan dapat ditambahkan dengan maksimal 50% modal penyertaan.

2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Aktiva produktif adalah kekayaan koperasi yang mendatangkan penghasilan bagi koperasi yang bersangkutan.

3. Aspek Manajemen

Manajemen koperasi adalah suatu proses untuk mencapai tujuan melalui usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Untuk mencapai tujuan koperasi, perlu diperhatikan adanya sistem manajemen yang baik, agar tujuannya berhasil, yaitu dengan diterapkannya fungsi-fungsi manajemen.

4. Aspek Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan.

5. Aspek Likuiditas

Likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban financial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia.

6. Aspek Kemandirian Dan Pertumbuhan

Kemandirian dan pertumbuhan koperasi merujuk pada bagaimana kemampuan koperasi dalam melayani masyarakat secara mandiri dan seberapa besar pertumbuhan koperasi di tahun yang bersangkutan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Aspek Jati Diri Koperasi.

Penilaian aspek jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota.

Adapun yang dimaksud Tingkat Kesehatan Koperasi Pegawai Republik Indonesia dalam penelitian ini adalah suatu kondisi dimana koperasi itu dinyatakan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dalam pengawasan khusus dilihat dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jati diri koperasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata *co* dan *operation*, yang mengandung arti kerjasama untuk mencapai tujuan, oleh sebab itu defenisi koperasi dapat diberikan sebagai berikut :“Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan luar sebagai anggota, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggota. (Abdul Muis, 2009: 46)

Secara harfiah kata “koperasi” berasal dari kata *cooperation* (Inggris) atau *co-operative* (Belanda), dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai bekerja sama, atau bekerja bersama, atau kerjasama merupakan koperasi. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, melalui pemebntukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis. Berikut ini adalah beberapa pengertian koperasi sebagai pegangan untuk mengenal koperasi lebih jauh. (Sudarsono dan Edilius, 2010: 1)

Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi. (Hendrojogi, 2010: 20)

Dari beberapa pengertian di atas maka koperasi dapat didefenisikan sebagai berikut : “Koperasi merupakan organisasi yang bergerak dibidang ekonomi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan di lapangan ekonomi, yang tujuannya tidak semata mata untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya,

koperasi lebih kepada mencari bagaimana dengan diadakan perkumpulan dapat memberikan kesejahteraan, kemakmuran, kekompakan kepada setiap anggota dan masyarakatnya”.

2. Jenis – jenis Koperasi

Pada dasarnya jenis koperasi dapat dikelompokkan ke dalam 4 jenis yaitu :

a. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang penumpukan simpanan dana dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana. Kegiatan utama koperasi simpan pinjam adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi.

b. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi konsumen adalah melakukan pembelian bersama. Jenis barang atau jasa yang dilayani suatu koperasi konsumen sangat tergantung pada latar belakang kebutuhan anggota yang akan dipenuhi. Sebagai contoh, koperasi yang mengelola took serba ada, mini market, dan sebagainya.

c. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa. Koperasi pemasaran dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan. Jadi masing-masing anggota koperasi menghasilkan barang secara individual, sementara pemasaran barang-barang tersebut dilakukan oleh koperasi. Ini berarti keikutsertaan anggota koperasi sebatas memasarkan produk yang dibuatnya. Tujuan utama koperasi pemasaran adalah

untuk menyederhanakan rantai tata niaga dan mengurangi sekecil mungkin keterlibatan para pedagang perantara dalam memasarkan produk-produk yang mereka hasilkan.

d. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang para anggotanya tidak memiliki badan usaha sendiri tetapi bekerjasama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi produsen adalah menyediakan, mengoperasikan dan mengelola sarana produksi bersama. Tujuan utama koperasi produsen adalah menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya guna menghasilkan barang-barang atau jasa tertentu melalui suatu badan usaha yang mereka kelola dan miliki sendiri. (Rudianto, 2010: 5-6)

3. Prinsip – prinsip Koperasi

a. Keanggotaan yang sukarela dan terbuka

Koperasi adalah organisasi yang bersifat sukarela, terbuka bagi semua orang tanpa pandang bulu yang bersedia menggunakan jasa-jasanya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan jenis kelamin, latar belakang sosial, ras, politik, atau agama.

b. Pengawasan secara demokratis oleh anggota

Koperasi adalah organisasi demokratis yang diawasi oleh para anggotanya, yang secara aktif terlibat dalam menetapkan kebijakan dan membuat keputusan.

c. Partisipasi ekonomi anggota

Para anggota memberikan kontribusi secara adil dan mengendalikan secara demokratis modal milik koperasi mereka. Sekurang-kurangnya sebagian modal biasanya adalah milik bersama koperasi.

d. Otonomi dan kemandirian

Koperasi adalah organisasi otonom, menolong diri sendiri diawasi oleh para anggotanya. Apabila koperasi mengadakan perjanjian dengan pihak lain termasuk dengan pemerintah, atau memupuk modal dari sumber luar, koperasi melakukannya berdasarkan persyaratan yang menjamin pengawasan demokratis oleh para anggotanya dan yang mempertahankan otonom mereka.

e. Pendidikan, pelatihan dan penerangan

Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi para anggota, wakil – wakil anggota yang dipilih secara sah serta para manajer dan karyawan, agar mereka dapat melakukan tugasnya lebih efektif bagi pengembangan koperasi. Mereka memberikan penerangan kepada masyarakat umum, khususnya pemuda dan para pembentuk opini di masyarakat tentang hakekat dan manfaat berkoperasi.

f. Kerjasama antar koperasi

Koperasi melayani para anggotanya secara efektif dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerjasama melalui struktur - struktur lokal, nasional, regional, dan internasional.

g. Kepedulian terhadap masyarakat

Koperasi melakukan kegiatan untuk pengembangan masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan, melalui kebijakan-kebijakan, yang disetujui oleh para anggotanya. (Salim Al Idrus, 2008: 63 – 64)

4. Fungsi Koperasi Indonesia

1. Koperasi Indonesia berfungsi sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.
2. Koperasi Indonesia sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional.
3. Koperasi Indonesia berfungsi sebagai alat Pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat. (Poetra, Bambang S, Setiady, 2007: 8-9)

5. Tujuan Koperasi

Koperasi mengandung dua unsur yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial. Koperasi merupakan suatu sistem dan sebagaimana diketahui sistem itu merupakan himbuan komponen-komponen atau bagian yang saling berkaitan yang secara bersama-sama berfungsi mencapai tujuan.

Tujuan yang dimaksud adalah tujuan ekonomi atau dengan kata lain bahwa koperasi harus berdasarkan atas motif ekonomi atau mencari keuntungan, sedangkan bagian-bagian yang saling berkaitan tersebut merupakan unsur-unsur ekonomi seperti digunakannya sistem pembukuan yang baku diadakannya pemeriksaan secara periodik, adanya cadangan dan sebagainya. Sedangkan unsur sosial, bukan dalam arti kedermawanan tetapi lebih untuk menerangkan kedudukan anggota dalam organisasi, hubungan antara sesama anggota dan hubungan anggota dengan pengurus. Juga unsur sosial ditemukan dalam cara koperasi yang demokratis, kesamaan derajat, kebebasan keluar masuk anggota, calon anggota, persaudaraan, pembagian sisa hasil usaha kepada anggota secara profesional dengan jasanya serta menolong diri sendiri. (Andjar Pachta, 2008: 21-22)

B. Penilaian Kesehatan Koperasi

Penilaian kesehatan koperasi adalah penilaian terhadap ukuran kinerja koperasi dan dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran, keberhasilan, pertumbuhan dan perkembangan serta keberlangsungan usaha koperasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Penilaian kesehatan koperasi dilakukan untuk mengukur tingkat kesehatan KSP dan USP koperasi serta kantor cabang KSP.

1. Sasaran Pedoman Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi.
 - a. Terwujudnya pengelolaan koperasi yang sehat dan mantap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b. Terwujudnya pengelolaan koperasi yang efektif, efisien, dan profesional.

- c. Terciptanya pelayanan prima kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya.
 - d. Meningkatnya citra dan kredibilitas kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola kegiatan usaha simpan pinjam sesuai dengan perundang-undangan.
 - e. Meningkatnya manfaat ekonomi anggota dalam kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.
2. Ruang lingkup penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam
- a. Ruang lingkup penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam meliputi penilaian terhadap beberapa aspek sebagai berikut:
 - 1) Permodalan
 - 2) Kualitas aktiva produktif
 - 3) Manajemen
 - 4) Efisiensi
 - 5) Likuiditas
 - 6) Kemandirian dan pertumbuhan
 - 7) Jatidiri koperasi
 - b. Setiap aspek diberikan bobot penilaian yang menjadi dasar perhitungan penilaian yang menjadi dasar perhitungan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam
 - c. Penilaian terhadap setiap aspek dilakukan dengan menggunakan system nilai yang dinyatakan dengan nilai 0 sampai dengan 100
 - d. Perincian mengenai bobot setiap aspek yang dinilai serta persyaratan dan tata cara penilaian kesehatan koperasi menggunakan pedoman yang terdapat dalam peraturan.
3. Hasil penilaian kesehatan KSP dan USP koperasi diklasifikasikan dalam 4 kategori, yaitu :
- a. Sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor 80, $00 \leq x < 100$.
 - b. Cukup sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor 66, $00 \leq x < 80, 00$.

- c. Dalam pengawasan, jika hasil penilaian diperoleh total skor $51,00 \leq \times < 66,00$.
- d. Dalam pengawasan khusus, jika hasil penilaian diperoleh total skor $0 < \times < 51,00$. (Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor : 06/ Per/ Dep.6/ IV/2016)

C. Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi

Penilaian Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah No.06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kesehatan dapat ditinjau dari beberapa aspek yaitu :

1. Permodalan

Modal sendiri (ekuitas) adalah sarana untuk melaksanakan usaha - usaha koperasi. Modal juga merupakan salah satu faktor produksi, di dalam neraca modal dilihat dari sumbernya, tampak pada posisi kredit atau passiva, sedangkan dilihat dari konkretnya modal dalam neraca tampak pada sisi debet atau aktiva. (Hendrojogi. 2010: 190)

Modal sendiri (Ekuitas) juga terdiri atas saham, laba ditahan dan agio saham. Namun, dari tiga jenis ekuitas itu yang bias diperoleh dari masyarakat adalah saham dan agio saham. Jadi, jika perusahaan ingin menambah modalnya tetapi tidak ingin dibebani utang, maka perusahaan dapat memilih menjual sahamnya. Yang paling dekat, tentu menjual kepada diri sendiri. Jika ini dilakukan, sebenarnya yang menjadi adalah pendiri penambah modalnya ke perusahaan dan tidak mengubah komposisi pemegang saham. (Sawidji Widoatmodjo, 2009: 29)

Penilaian dilakukan dengan menggunakan 3 (rasio) permodalan yaitu :

a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total aset ditetapkan sebagai berikut: (Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 06/ Per/ Dep.6/ IV/2016, p. 4-5)

Rumus :

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

- 1) Untuk rasio antara modal sendiri dengan total aset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.
- 2) Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0% nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
- 3) Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5.
- 4) Nilai dikalikan bobot sebesar 6% diperoleh skor permodalan.

Tabel 1
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri
terhadap Total Aset adalah sebagai berikut:

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	0	0
1 - 20	25	6	1.50
21 - 40	50	6	3.00
41 - 60	100	6	6,00
61 – 80	50	6	3.00
81 – 100	25	6	1,50

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor : 06/Per/ Dep.6/ IV/2016

b. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, ditetapkan sebagai berikut :

Rumus :

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman yang diberikan Berisiko}} \times 100\%$$

- 1) Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
- 2) Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.

- 3) Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan.

Tabel 2
Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap
Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio Modal Dinilai Dalam %)	Nilai	Bobot (Dinilai Dalam %)	Skor
0	0		0
1 – 10	10	6	0,6
11-20	20	6	1,2
21 -30	30	6	1,8
31 -40	40	6	2,4
41 -50	50	6	3,0
51 -60	60	6	3,6
61 – 70	70	6	4,2
71 – 80	80	6	4,8
81 – 90	90	6	5,4
91 – 100	100	6	6,0

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor : 06/ Per/ Dep.6/ IV/2016

c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rumus :

$$\frac{\text{Modal Sendiri Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

1. Rasio kecukupan modal sendiri adalah perbandingan Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.
2. Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
3. ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.

4. Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
5. Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100%.

Tabel 3
Standar perhitungan rasio kecukupan modal sendiri

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 4	0	3	0,00
$4 \leq x < 6$	50	3	1,50

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

2. Kualitas aktiva Produktif

Aktiva produktif adalah kekayaan koperasi yang mendatangkan penghasilan bagi koperasi yang bersangkutan.

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 4 (empat) rasio, yaitu: (Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016, p. 6-9)

- a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan.

Rumus :

$$\frac{\text{Volume Pinjaman pada Anggota}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$$

Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan berikut :

Tabel 4
Standar Perhitungan Skor Rasio Volume
Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
-----------	-------	-----------	------

< 25	0	10	0,00
26-50	50	10	5,00
51 - 75	75	10	7,50
>75	10	10	10,00

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor : 06/ Per/ Dep.6/ IV/2016

b. Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan. Untuk memperoleh rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut :

Rumus :

$$\frac{\text{Pinjaman Bermasalah}}{\text{Pinjaman Diberikan}} \times 100\%$$

Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut:

- 1) 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL).
- 2) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR).
- 3) 100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM).

Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan.

$$\text{RPM} = \frac{(50\% \times \text{PKL}) + (75\% \times \text{PDR}) + 100}{\text{Pinjaman yang Diberikan}}$$

Perhitungan penilaian:

1. Untuk rasio 45% atau lebih diberi nilai 0;
2. Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45% nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100; dan
3. Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 5
Standar Perhitungan RPM

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 45	0	5	0
$40 < x < 45$	10	5	0,5
$30 < x < 40$	20	5	1,0
$20 < x < 30$	40	5	2,0
$10 < x < 20$	60	5	3,0
$0 < x \leq 10$	80	5	4,0
0	100	5	5,0

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor : 06/ Per/ Dep.6/ IV/2016

c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah.

Rumus :

$$\frac{\text{Cadangan Risiko}}{\text{Pinjaman Bermasalah}} \times 100\%$$

Dihitung dengan Cara sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0.
- 2) Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0%, nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100.
- 3) Nilai dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 6
Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko
Pinjaman Bermasalah:

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
1-10	10	5	0,5
11-20	20	5	1,0
21-30	30	5	1,5
31-40	40	5	2,0
41-50	50	5	2,5
51-60	60	5	3,0
61-70	70	5	3,5
71-80	80	5	4,0
81-90	90	5	4,5
91-100	100	5	5,0

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor : 06/ Per/ Dep.6/ IV/2016

- d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan.

Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan diatur dengan ketentuan sebagai berikut.

Rumus :

$$\frac{\text{Pinjaman yang Berisiko}}{\text{Pinjaman yang Diberikan}} \times 100\%$$

Tabel 7
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 30	25	5	1,25
26-30	50	5	2,50
21-25	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor : 06/ Per/ Dep.6/ IV/2016

3. Manajemen

Manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi.

Manajmen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. (Hafulyon, 2010: 1-2)

Manajemen merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian dari berbagai sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efesien. (Ismail Solihin, 2009: 3)

Menurut the contemporary business dictionary, manajemen mempunyai dua nama, yaitu:pertama, proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan perusahaan, untuk mencapai sasaran tertentu. Kedua, para pemimpin perusahaan. (Tiktik Sartika Partomo, 2009: 37)

Manajemen menurut parker ialah seni melaksanakan pekerjaan melalui orang orang.(Husaini Usman, 2008: 4)

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa manajmen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaa, dan pengawasan dalam mencapai tujuan tertentu dalam melaksanakan suatu pekerjaan.

Penilaian aspek manajemen meliputi lima komponen sebagai berikut: (Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor : 06/ Per/ Dep.6/ IV/2016: 9-11)

1. Manajemen umum

Perhitungan nilai didasarkan pada hasil penilaian terhadap jawaban atas pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan.

Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan "ya");

Tabel 8
Standar Perhitungan Manajemen Umum

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,25

2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
Nomor : 06/ Per/ Dep.6/ IV/2016

2. Kelembagaan

Perhitungan nilai didasarkan pada hasil penilaian terhadap jawaban atas pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan. Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan "ya");

Tabel 9
Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor :
06/ Per/ Dep.6/ IV/2016

3. Manajemen permodalan

Perhitungan nilai didasarkan pada hasil penilaian terhadap jawaban atas pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan.

Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan "ya") ;

Tabel 10
Standar Perhitungan Manajemen Permodalan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor : 06/ Per/ Dep.6/ IV/2016

4. Manajemen aktiva

Perhitungan nilai didasarkan pada hasil penilaian terhadap jawaban atas pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan. Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan "ya").

Tabel 11
Standar Perhitungan Manajemen Aktiva

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor : 06/ Per/ Dep.6/ IV/2016

5. Manajemen likuiditas

Perhitungan nilai didasarkan pada hasil penilaian terhadap jawaban atas pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan. Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan "ya").

Tabel 12
Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor : 06/ Per/ Dep.6/ IV/2016

4. Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan dan seberapa besar kemampuan koperasi melayani anggotanya dengan penggunaan asset dan biaya seefesien mungkin. (Henrikus Herdi, Nur Fadrih Asyik dan Lailatul Amanah, 2013: 6)

Secara matematis efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau dengan istilah lain output per unit input. Untuk mengukur efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan biaya sesungguhnya dengan biaya standar. Biaya standar menunjukkan biaya yang seharusnya terjadi untuk menghasilkan output tertentu. Pengukuran efisiensi juga dilakukan dengan cara membandingkan realisasi belanja dengan standar belanjanya. (Mahmudi, 2015: 85-86)

Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara satu hasil dengan usahanya. Perbandingan ini dapat dilihat dari dua segi yaitu :

- 1) Hasil adalah suatu kegiatan dapat dikatakan efisien, jika usaha memberikan hasil yang maksimum. Maksimum dari segi mutu atau jumlah satuan hasil.
- 2) Usaha adalah suatu kegiatan dapat dikatakan efisien, jika suatu hasil tertentu tercapai dengan usaha yang minimum, mencakup lima unsure yaitu pikiran, tenaga, jasmani, waktu, ruang dan benda (termasuk uang).

Penilaian efisiensi KSP/USP koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu: (Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor : 06/ Per/ Dep.6/ IV/2016, p. 11-13)

1. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto.

Cara perhitungan rasio beban operasi anggota atas partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut :

Rumus :

$$\frac{\text{Beban Operasi Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$$

- a. Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95% hingga lebih kecil dari 100% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100; dan
- b. Nilai dikalikan 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 13
Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota
terhadap Partisipasi Bruto

Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 100	0	4	1
$95 \leq x < 100$	50	4	2
$90 \leq x < 95$	75	4	3

< 90	100	4	4
------	-----	---	---

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor : 06/Per/ Dep.6/ IV/2016

2. Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor

Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor ditetapkan sebagai berikut :

Rumus :

$$\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$$

- Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100;
- Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian

Tabel 14
Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>80	0	4	1
$60 < x \leq 80$	50	4	2
$40 < x \leq 60$	75	4	3
≤ 40	100	4	4

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor : 06/Per/ Dep.6/ IV/2016

3. Rasio efisiensi pelayanan.

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman, yang ditetapkan sebagai berikut:

Rumus :

$$\frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$$

- a. Untuk rasio lebih dari 15% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10% hingga 15% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1% nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100; dan
- b. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian.

Tabel 15
Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio Efisiensi Staf (Persen)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	100	2	2,0
5 <x<10	75	2	1,5
10 ≤ x ≤15	50	2	1,0
> 15	0	2	0,0

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor : 06/Per/ Dep.6/ IV/2016

5. Likuiditas

Perhitungan aspek likuiditas menyangkut kemampuan Koperasi Simpan Pinjam dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Artinya apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut terutama utang yang sudah jatuh tempo. (Kasmir, 2011: 129)

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas dilakukan terhadap 2 (dua) rasio,

yaitu: (Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor : 06/ Per/ Dep.6/ IV/2016: 13-14)

- a. Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar

Pengukuran Rasio Kas Bank terhadap Kewajiban Lancar. Pengukuran Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar ditetapkan sebagai berikut:

Rumus :

$$\frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

- 1) Untuk rasio kas lebih besar dari 10% hingga 15% diberi nilai 100, untuk rasio lebih besar dari 15% sampai dengan 20% diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10% diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20% diberi nilai 25.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

Tabel 16
Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar

Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 10	25	10	2,5
$10 < x \leq 15$	100	10	10
$15 < x \leq 20$	50	10	5
> 20	25	10	2,5

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor : 06/ Per/ Dep.6/ IV/2016

- b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.

Pengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut :

Rumus :

$$\frac{\text{Pinjaman yang Diberikan}}{\text{Dana yang Diterima}} \times 100\%$$

- 1) Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100; dan
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 17
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang Diterima

Rasio Pinjaman (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 60	25	5	1,25
$60 \leq x < 70$	50	5	2,50
$70 \leq x < 80$	75	5	3,75

$80 \leq x < 90$	100	5	5
------------------	-----	---	---

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor : 06/ Per/ Dep.6/ IV/2016

6. Kemandirian Dan Pertumbuhan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 06/ Per/Dep.6/IV/2016, dijelaskan bahwa: “kemandirian dan pertumbuhan koperasi merujuk pada bagaimana kemampuan koperasi dalam melayani masyarakat secara mandiri dan seberapa besar pertumbuhan koperasi di tahun yang bersangkutan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya”.

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional. (Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor : 06/ Per/ Dep.6/ IV/2016: 14-16)

a. Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset adalah SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut :

Rumus :

$$\frac{\text{SHU Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

- 1) Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian

Tabel 18
Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas Aset

Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	25	3	0,75
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
≥ 10	100	3	3,00

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor : 06/ Per/ Dep.6/ IV/2016

b. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri adalah SHU bagian anggota dibandingkan total modal sendiri, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

Rumus :

$$\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$$

- 1) Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100; dan
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 19
Standar Perhitungan untuk Ratio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0,75
$3 \leq x < 4$	50	3	1,50
$4 \leq x < 5$	75	3	2,25
≥ 5	100	3	3,00

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor : 06/ Per/ Dep.6/ IV/2016

c. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio kemandirian operasional adalah Partisipasi Netto dibandingkan Beban Usaha ditambah beban perkoperasian, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

Rumus :

$$\frac{\text{Partisipasi Netto}}{\text{Beban Usaha} + \text{Beban Perkoperasian}} \times 100\%$$

- 1) Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100% diberi nilai 100.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 20
Standar Perhitungan Ratio Kemandirian Operasional

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 100	0	4	0
< 100	100	4	4

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor : 06/ Per/ Dep.6/ IV/2016

7. Jati Diri Koperasi

Jati diri koperasi adalah tujuan dari sebuah koperasi dalam mempromosikan anggotanya. Penilaian Aspek jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. (Henrikus Herdi, Nur Fadrijh Asyik dan Lailatul Amanah, 2013: 6)

Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan 2 rasio yaitu: (Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 06/ Per/ Dep.6/ IV/2016: 16-17)

a. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa kepada anggota, yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto.

Rumus :

$$\frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Partisipasi Bruto} + \text{Pendapatan}} \times 100\%$$

Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot 7 % diperoleh skor penilaian.

Tabel 21
Standar perhitungan sebagai berikut:

Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7	1,75
$25 \leq x < 50$	50	7	3,50
$50 \leq x < 75$	75	7	5,25
≥ 75	100	7	7

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor : 06/ Per/ Dep.6/ IV/2016

b. Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik.

Rumus :

$$\frac{\text{PEA}}{\text{Simpanan Pokok} + \text{Simpanan Wajib}} \times 100\%$$

Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib, yang ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2,5 %, nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100.

- 2) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 22
Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Rasio PEA (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	0	3	0,00
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50,
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
≥ 10	100	3	3

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016

D. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan hasil tinjauan dari penelitian sebelumnya, khususnya yang berhubungan permasalahan yang akan diteliti, sudah ada orang yang menelitinya tetapi penelitian ini dilakukan penulis berbeda dengan peneliti sebelumnya.

Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh **Alfi Rohmaning Tyas** Pada tahun 2014 yang berjudul “**Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Mukti Bina Usaha Kelurahan Muktisari Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2011-2013**” Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan KSP Mukti Bina Usaha tahun 2011-2013 berada dalam kategori “CUKUP SEHAT”, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia N0. 14/Per/M.KUKM/XII/2009, jumlah skor yang dihasilkan berada pada kisaran $60 \leq x < 80$.

Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh **Dian Melisa** pada tahun 2015 yang berjudul “**Penilaian Tingkat Kesehatan KUD Cempaka Nagari Sungayang**” Hasil dari penilaian tingkat kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 yang telah penulis lakukan pada tahun 2012 memperoleh skor akhir sebesar 58,85 dengan predikat kurang sehat, sedangkan pada tahun 2013 memperoleh skor akhir sebesar 63,75 dengan

predikat cukup sehat dan pada tahun 2014 memperoleh skor akhir sebesar 65,60 dengan predikat cukup sehat.

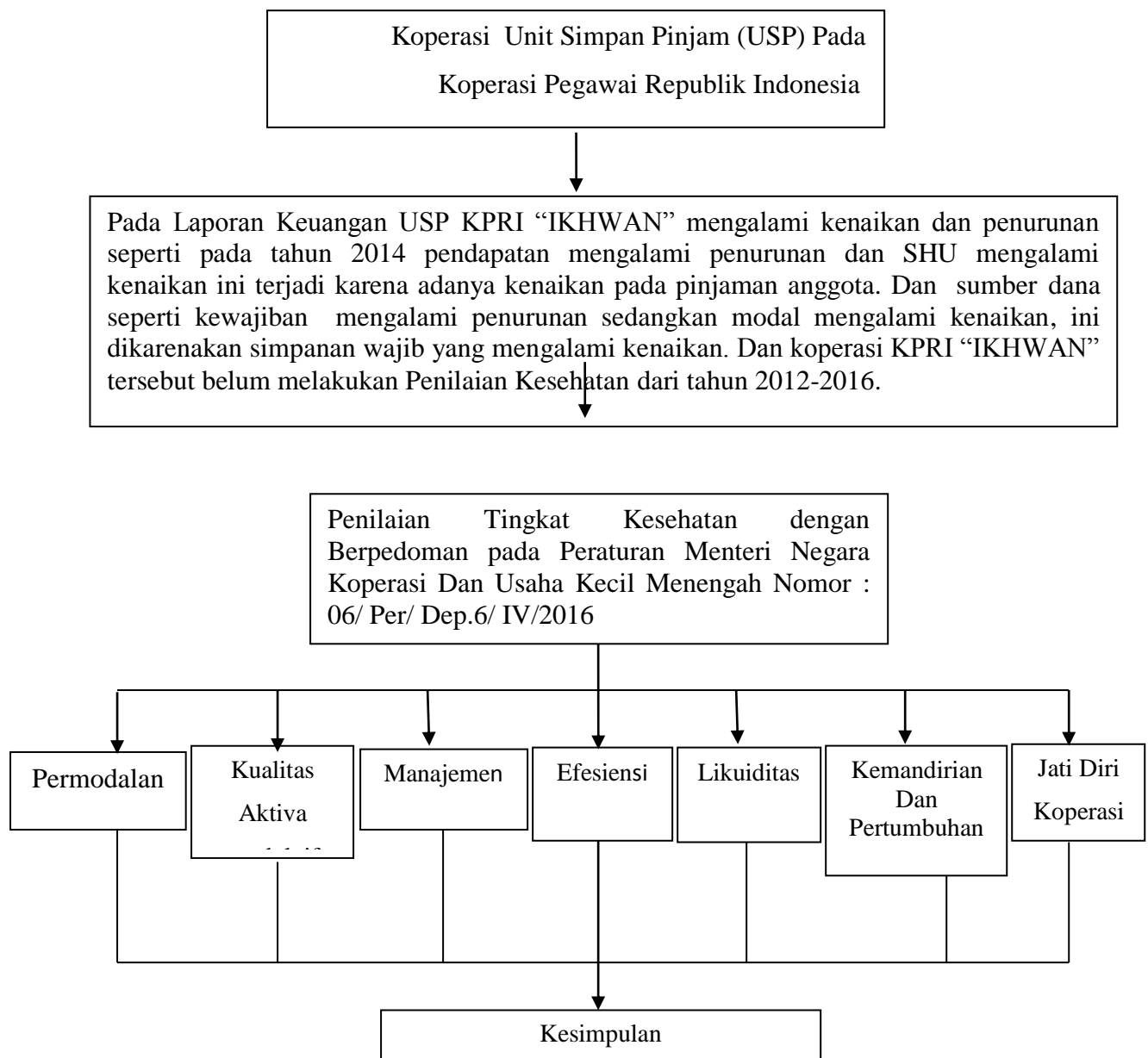
Penelitian Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh **Henrikus Herdi** tahun 2013 yang berjudul **“Kajian Tingkat Kesehatan Koperasi Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 14 Tahun 2009”** Hasil penelitian berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 menunjukkan bahwa tingkat kesehatan Koperasi Kredit Tuke Jung mengalami fluktuasi yaitu tahun 2009 diperoleh skor 75,95 dan masuk dalam predikat cukup sehat, tahun 2010 diperoleh skor 82,7 dan masuk dalam predikat sehat, dan tahun 2011 diperoleh skor 73,95 masuk dalam predikat cukup sehat.

Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh **Fadilah Rahmi Karim** pada tahun 2017 yang berjudul **“Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kota Tangerang Selatan”** Hasil penelitian dengan menggunakan **Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016** tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan dari 8 sampel yang dijadikan objek penelitian pada penelitian ini, sebanyak 1 KSPPS/BMT berada pada predikat tingkat kesehatan **sehat**, 6 KSPPS/BMT berada pada predikat tingkat kesehatan **cukup sehat** dan 1 KSPPS/BMT berada pada predikat tingkat kesehatan **dalam pengawasan**.

Ada yang membedakan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian diatas yaitu Penelitian Tersebut menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009 dalam melakukan Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam dan penelitian diatas juga menggunakan praturan Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah. Sedangkan penelitian ini menggunakan Peraturan

Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor : 07/ Per/ Dep.6/ IV/2016 dalam melakukan Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam.

E. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang dilakukan dengan turun langsung kelapangan untuk memperoleh data- data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa ingin kita ketahui, dan penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data- data (laporan keuangan) yang ada pada Koperasi Unit Simpan Pinjam KPRI Ikhwan Kota Payakumbuh.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia (KPRI) di Kota Payakumbuh. Waktu penelitian dilaksanakan mulai dari survey awal atau mengambil data awal pada bulan November tahun 2017 sampai dengan Februari 2018.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Sumer Data primer

Sumber data primer adalah pengurus yang terdiri dari Ketua, Bendahara, dan Sekretaris Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Ikhwan Kota Payakumbuh yang akan memberikan hasil jawaban dari pertanyaan yang berisikan aspek – aspek manajemen.

2. Sumber data skunder

Sumber data skunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Ikhwan dari tahun 2012 – 2016.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Kuesioner

Kuesioner dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan yang berisikan aspek-aspek manajemen yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil menengah Nomor : 06/ Per/Dep.6/IV/2016 pertanyaan ini diberikan kepada pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) dan selanjutnya dinilai berdasarkan skor yang telah ditentukan.

b. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode untuk memperoleh data, catatan, atau dokumen tertulis, yang dikumpulkan dalam bentuk arsip yang berhubungan dengan objek penelitian. Metode dokumentasi dalam penelitian ini lebih menekankan pada pencarian fakta dan pengumpulan data dalam bentuk arsip laporan keuangan pada KPRI Ikhwan Kota Payakumbuh - Kab.Lima Puluh Kota. Selain data keuangan tersebut juga data tentang jumlah anggota, struktur organisasi koperasi, sejarah dan perkembangan koperasi dan dokumen lain yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan yaitu menganalisis data secara kuantitatif deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Dalam mengukur kinerja keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah atau Unit Jasa Keuangan Syari'ah menggunakan aspek penilaian tingkat kesehatan berdasarkan

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil menengah Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dilihat dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan dan jati diri koperasi. Bobot penilaian terhadap aspek kesehatan dan cara penilaian untuk memperoleh angka skor adalah :

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian	
1	Permodalan			15
		a. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	6	
		b. Rasio Modal Sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang Beresiko}} \times 100\%$	6	
		c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri $\frac{\text{Modal Sendiri Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	3	
2	Kualitas Aktiva Produktif			25
		a. Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan $\frac{\text{Volume Pinjaman Pada Anggota}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$	10	
		b. Rasio resiko Pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan $\frac{\text{Pinjaman Bermasalah}}{\text{Pinjaman yang Diberikan}} \times 100\%$	5	
		c. Rasio Cadangan Resiko terhadap Pinjaman Bermasalah	5	

		$\frac{\text{Cadangan Resiko}}{\text{Pinjaman Bermasalah}} \times 100\%$		
		d. Rasio Pinjaman yang Beresiko terhadap pinjaman yang diberikan	5	
		$\frac{\text{Pinjaman yang Beresiko}}{\text{Pinjaman yang Diberikan}} \times 100\%$		
3	Manajemen			15
		a. Manajemen Umum	3	
		b. Kelembagaan	3	
		c. Manajemen Permodalan	3	
		d. Manajemen Aktiva	3	
		e. Manajemen Likuditas	3	
4	Efisiensi			10
		a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto	4	
		$\frac{\text{Beban Operasi Anggota}}{\text{partisipasi Bruto}} \times 100\%$		
		Catatan: beban operasional anggota adalah beban pokok ditambah dengan beban usaha bagi anggota + beban perkoperasian. Untuk USP Koperasi, beban perkoperasian dihitung secara proporsional		
		b. Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor	4	
		$\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$		
		c. Rasio Efisiensi Pelayanan	2	
		$\frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$		
5	Likuditas			15
		a. Rasio Kas	10	

		$\frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$		
		<p>b. Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima</p> $\frac{\text{Pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana yang Diterima}} \times 100\%$ <p>Catatan: Dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi</p>	5	
6	Kemandirian dan Pertumbuhan			10
		<p>a. Rentabilitas asset</p> $\frac{\text{SHU Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	3	
		<p>b. Rentabilitas Modal Sendiri</p> $\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$	3	
		<p>c. Kemandirian Operasional Pelayanan</p> $\frac{\text{Partisipasi Neto}}{\text{Beban Usaha + Beban Perkoperasian}} \times 100\%$ <p>Catatan: beban usaha adalah beban usaha bagi anggota</p>	4	
7	Jatidiri Koperasi			10
		<p>a. Rasio partisipasi bruto</p> $\frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{partisipasi Bruto + Pendapatan}} \times 100\%$	7	
		<p>b. Rasio Promosi ekonomi anggota (PEA)</p> $\frac{\text{PEA}}{\text{Simpanan Pokok + Simpanan Wajib}} \times 100\%$ <p>PEA = MEPPP + SHU Bagian Anggota</p>	3	
		Jumlah		100

Sumber :Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor : 06/ Per/ Dep.6/ IV/2016

E. Penetapan Kesehatan Koperasi

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 komponen sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 7, diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi, yang dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu Sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan, dan Dalam Pengawasan Khusus.

Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.2
Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP

Skor	Predikat
80.00 - 100	Sehat
66.00 - 80.00	Cukup Sehat
51.00 - 66.00	Dalam Pengawasan
< 51.00	Dalam Pengawasan Khusus

Sumber :Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor : 06/ Per/ Dep.6/ IV/2016

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. SEJARAH KOPERASI

1. Sejarah Singkat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Ikhwan Kota Payakumbuh

Koperasi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Ikhwan Kota Payakumbuh mulai berdiri pada tanggal 10 Maret 1977 dan berbadan hukum pada tahun 1977 dengan Nomor Badan Hukum 112/BH-XVIII. Bidang usaha yang dijalankan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Ikhwan yaitu unit simpan pinjam dan usaha waserda.

2. Visi dan Misi Koperasi

a. Visi Koperasi

Visi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Ikhwan yaitu :
“Terwujudnya peningkatan Kesejahteraan seluruh anggota”.

b. Misi Koperasi

Misi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Ikhwan yaitu :

- 1) Meningkatkan pemberian pinjaman kepada anggota untuk investasi dan modal usaha.
- 2) Meningkatkan hubungan kerja dengan pihak ketiga untuk penambahan modal koperasi.
- 3) Disiplin, jujur dan tansparan dalam pelayanan.
- 4) Tertib, lengkap dan teraturdalam administrasi.

3. Bidang Organisasi

Pada awalnya KPRI Ikhwan bernama koperasi pegawai Negeri (KPN) Ikhwan Kantor Perwakilan Departement Agama Kabupaten Lima Puluh Kota, berdiri tanggal 05 Januari 1972 berkedudukan di kantor Department Agama Kabupaten Lima puluh Kota di Payakumbuh, dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Ketua : Baharuddin Buyung
 Sekretaris : Mukhli
 Bendahara : Dja'far Madjaz

Pertama kali jumlah anggota sebanyak 121 orang dengan simpanan pokok Rp. 100,- dan simpanan wajib Rp. 100,- / perbulan. Sedangkan besar pinjaman belum ditetapkan hanya tergantung pada persediaan dana koperasi.

Setelah terjadi pemisahan /Pembentukan Perwakilan Departemen Agama Kota Madya Payakumbuh imana ketua sekretaris KPN Ikhwan tersebut diatas dipindahkan ke Perwakilan Departemen Agama Kota Payakumbuh, dan bahkan ketuanya bapak Baharuddin Buyung diangkat menjadi kepala perwakilan Departemen Agama Kota Payakumbuh, maka kedudukan KPN Ikhwan pun juga pindah dari perwakilan Departemen Agama Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Kantor Perwakilan Departemen Agama Kota Payakumbuh.

Kemudian atas kuasa rapat Pembentukan Perkumpulan Koperasi pada tanggal 26 Maret 1957, dengan nama-nama dibawah ini :

1. Baharuddin Buyung : Kepala Perwakilan Departemen Agama
Kota Payakumbuh
2. Muclis BA : Pejabat sementara kepala inspeksi
Penerangan Agama Kota Payakumbuh
3. Faizal Zen : Penilik Agama Kota Payakumbuh
4. Azra'I Yahya : Pegawai Inspeksi Pendidikan Agama
Kabupaten Lima Puluh kota
5. Dja'far Madjaz : Pegawai Ispeksi Pendidikan Agama
Kabupaten Lima Puluh Kota

Menyatakan mendirikan perkumpulan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Ikhwan Perwakilan Departemen Agama Kabupaten Lima Puluh Kota /Kota Payakumbuh, dan sekaligus mendaftarkannya pada kantor

wilayah Ditjen Koperasi Provinsi Sumatra Barat sehingga keluarlah Badan Hukum KPN Ikhwan Nomor : 121/BH-XVII, tanggal 10 Maret 1977.

Kemudian berdasarkan surat keputusan Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor : 8a/PAD/KPK. 314.XI/2000, tanggal 14 November 2000 tentang Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, maka koperasi ini menjadi koperasi pegawai republik Indonesia (KPRI) Ikhwan Kantor Departemen Agama Kota Payakumbuh /Kabupaten Lima Puluh Kota.

4. Kepengurusan dan Pengawas

a. Kepengurusan

Kepengurusan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Ikhwan sebagai berikut :

Ketua Umum	: Drs. JUFRIMAL, MA
Wakil Ketua	: Drs. IFKAR, MA
Sekretaris	: Drs. AHMAD IMTAZ
Wakil Sekretaris	: YOLI SISCA, SE
Bendahara	: MAIJULNAMRI, SE

b. Pengawas

Pengawas Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Ikhwan sebanyak 3 orang sebagai berikut :

Ketua	: H. ZAMRIS, S.Pd
Anggota	: Drs. H. YUSRIAL
Anggota	: H. ALEX SANDRA, S.Ag, M.M.Pd

B. ANALISIS DATA

Tingkat Kesehatan USP Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kota Payakumbuh

Analisis data yang digunakan untuk melakukan penilaian kinerja koperasi dalam penelitian ini yaitu menggunakan Peraturan Deputi

Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016. Aspek yang dinilai yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jati diri koperasi.

a. Permodalan

1) Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

Rumusnya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Data perolehan modal sendiri dan total aset KPRI Kota Payakumbuh tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Data Modal Sendiri dan Total Aset KPRI Ikhwan Payakumbuh tahun 2012-2016 dalam (Rp)

Komponen	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
MODAL SENDIRI:					
Simpanan pokok	15,450,000	14,420,000	13,980,000	6,095,000	6,805,000
Simpanan wajib	2,777,706,579	3,129,104,840	3,759,082,989	4,013,302,851	4,406,435,351
Simpanan usaha	-	705,017,385	752,192,922	-	-
Simpanan wajib	253,797,695	267,471,899	271,844,448	303,034,404	363,496,100

khusus					
Modal Anggota	-		-	-	4,776,736,451
Cadangan umum	90,159,263	138,358,310	165, 633, 359	183, 925, 481	-
Cadangan dana resiko	-		-	150,172,543	136,068,895
Cadangan					204,365,910
Donasi	2,500,000	3,925,000	3,925,000	3,925,000	3,925,000
Dana SHU anggota	611,6322,144	25,613,587	26, 112, 462	-	-
SHU belum dibagikan	-		131, 505, 947	15, 926, 534	111,546,988
Jumlah Modal Sendiri	3,751,245,681	4,283,911,021	4.812,771,180	4.812,651,444	5,232,643,244
Total Aset	7.006.283.260	7.150.705.948	6.707, 349, 595	6.433.856.941	6.524.123.247

Sumber: Data Laporan Keuangan KPRI Ikhwan dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2012-2016

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total asset ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio antara modal sendiri dengan total asset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.
- b) Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0% nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
- c) Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurang 5.
- d) Nilai dikalikan bobot sebesar 6% diperoleh skor permodalan.

Tabel 4. 2
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap
Total Asset adalah sebagai berikut:

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	0	0
1 - 20	25	6	1.50
21 - 40	50	6	3.00
41 - 60	100	6	6.00
61-80	50	6	3.00
81 – 100	25	6	1.50

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha
 Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Tabel 4. 3
Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset tahun 2012-2016

Tahun	Modal Sendiri (MS) (Rp)	Total Aset (TA) (Rp)	Rasio MS/TA (%)
2012	751.245.681	1.006.283.260	53,54
2013	283.911.021	470.705.948	59.91
2014	812.771,180	1.074.403.113.828	75,16
2015	812,651,444	1.074.433.856.941	74,80
2016	232.643.244	287.524.123.247	80,21

Sumber : Laporan Keuangan KPRI Ikhwan dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2012-2016

Dari perhitungan rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset maka dilakukan penskoran sebagai berikut:

Tabel 4. 4
Penskoran Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset tahun 2012-2016

Tahun	Rasio MS/TA (%)	Nilai (a)	Bobot (%) (b)	Skor (a)*(b)
2012	53,54	100	6	6.00
2013	59.91	100	6	6.00
2014	75,16	50	6	3.00
2015	74,80	50	6	3.00

2016	80,21	25	6	1.50
------	-------	----	---	------

Sumber: Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset yang telah diolah penulis

Dari table diatas, dapat dilihat rasio modal sendiri terhadap total asset tahun 2012 adalah 53,54% , tahun 2013 adalah 59,91% dan tahun 2014 adalah 75,16%, tahun 2015 adalah 74,80% dan tahun 2016 adalah 80,21%. Karena rasio modal diantara 41 – 60 pada tahun 2012-2013 maka nilainya adalah 100 dan skor untuk rasio modal sendiri terhadap total asset adalah 6,00. Dan pada tahun 2014-2015 rasio modalnya 21 – 40 nilainya 50 dan skor rasio modal sendiri terhadap total asset adalah 3.00, dan pada tahun 2016 rasio modal diantara 1 – 20 nilainya 25 dan skor untuk rasio modal sendiri terhadap total asset adalah 1.50. Rasio modal sendiri terhadap total asset belum dikatakan sehat dikarenakan masih belum mencapai skor maximal yaitu 6.00.

2) Rasio Modal Sendiri terhadap pinjaman yang diberikan yang Berisiko

Rumusnya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman yang Berisiko}} \times 100\%$$

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, ditetapkan sebagai berikut :

- Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
- Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.
- Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan.

Tabel 4. 5
Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri
terhadap Pinjaman diberikan yang Berisiko

Rasio Modal (dinilai dalam%)	Nilai	Bobot (dinilai	Skor
------------------------------	-------	----------------	------

		dalam%)	
0	0	0	0
1 - 10	10	6	0.6
11 - 20	20	6	1.2
21 - 30	30	6	1.8
31 - 40	40	6	2.4
41 - 50	50	6	3.0
51 - 60	60	6	3.6
61 - 70	70	6	4.2
71 - 80	80	6	4.8
81 - 90	90	6	5.4
91 - 100	100	6	6.0

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor:06/Per/Dep.6/IV/2016

Tabel 4. 6
Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman yang Diberikan yang Berisiko tahun 2012-2016

Tahun	Modal Sendiri (MS) (Rp)	Pinjaman Berisiko(PB): Piutang (Rp)	Rasio MS/PB (%)
2012	3.751.245.681	6. 856. 440. 446	54.71
2013	4.283.911.021	6. 860. 904. 584	62.44
2014	4.812.771.180	6. 558. 108. 078	73.39
2015	4.812.651.444	5. 686. 577. 107	84.63
2016	5.232.643.244	6. 123. 909. 060	85.45

Sumber: Laporan Keuangan KPRI Ikhwan dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2012-2016

Pinjaman diberikan yang berisiko adalah dana yang dipinjamkan oleh KSP atau USP kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan yang memadai atau jaminan dari penjamin yang dapat diandalkan atas pinjaman yang diberikan tersebut. (Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 20/Per/M. Kukm/XI/2008).

Dari perhitungan rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang berisiko maka dilakukan penskoran sebagai berikut:

Tabel 4. 7
Penskoran Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang Berisiko tahun 2012-2016

Tahun	Rasio MS/PB (%)	Nilai (a)	Bobot (%) (b)	Skor (a)*(b)
2012	54.71	60	6	3.6
2013	62.44	70	6	4.2
2014	73.39	80	6	4.8
2015	84.63	90	6	5.4
2016	85.45	90	6	5.4

Sumber: Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang Berisiko telah diolah penulis

Dari table diatas, dapat dilihat rasio modal sendiri terhadap total asset tahun 2012 adalah 54,71% , tahun 2013 adalah 62,44% dan tahun 2014 adalah 73.39%, tahun 2015 adalah 84,63% dan tahun 2016 adalah 85,45%. Karena rasio modal 2012 diantara 51-60 dengan nilai 60 dan skor rasio modal sendiri terhadap total asset adalah 3.6 pada dan tahun 2013 rasio modal sendiri 61- 70 maka nilainya adalah 70 dan skor rasio modal sendiri terhadap total asset adalah 4.2 Dan pada tahun 2014 71- 80 dengan nilai 80 dan skor rasio modal sendiri terhadap total asset adalah 4.8 dan pada tahun 2015 rasio modalnya 81-90 nilainya 90 dan skor rasio modal sendiri terhadap total asset adalah 5,4, dan pada tahun 2016 rasio modal diantara 81- 90 nilainya 90 dan skor untuk rasio modal sendiri terhadap total asset adalah 5,4. Rasio modal sendiri belum dapat dikatakan sehat dikarenakan belum mencapai skor maximal yaitu 6.00.

3) Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rumusnya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Modal Sendiri Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Data perhitungan modal tertimbang KPRI Ikhwan tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Perhitungan Modal Tertimbang KPRI Ikhwantahun 2012

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Resiko (%)	Modal Tertimbang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
MODAL SENDIRI				
1	Modal Anggota			
	a. Simpanan pokok	15,450,000	100	15.450.000
	b. Simpanan wajib	2,777,706,579	100	2.777.706.579
	c. Simpanan usaha	-	100	0
	d. Simpanan wajib khusus	253,797,695	100	253,797,695
2	Modal Penyetaraan	0	100	0
3	Modal Penyertaan	0	50	0
4	Donasi	2,500,000	100	2.500.000
5	Dana SHU Anggota	611,632,144	50	305,816,072
6	Cadangan umum	90,195,263	100	90.195.263
7	SHU tahun berjalan	107,402,846	50	53.701.423
KEWAJIBAN				
8	Kewajiban jangka pendek	295,311,006	50	147.655.503
9	Kewajiban jangka panjang	2,852,323,727	50	1.426.161.864
JUMLAH				5,072,984,399

Sumber: Data Laporan Keuangan KPRI Ikhwandalam RAT (Rapat Anggota Tahunan)tahun 2012

Tabel 4.9
Perhitungan Modal Tertimbang KPRI Ikhwan tahun 2013

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Resiko (%)	Modal Tertimbang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
MODAL SENDIRI				
1	Modal Anggota			
	a. Simpanan pokok	14,420,000	100	14,420,000
	b. Simpanan wajib	3,129,104,840	100	3,129,104,840
	c. Simpanan usaha	705,017,385	100	705,017,385

	d. Simpanan wajib khusus	267,471,899	100	267,471,899
2	Modal Penyetaraan	0	100	0
3	Modal Penyertaan	0	50	0
4	Donasi	3,925,000	100	3,925,000
5	Dana SHU Anggota	25,613,587	50	12,806,794
6	Cadangan Umum	138,858,310	100	138,858,310
7	SHU tahun berjalan	107,962,988	50	53,981,494
KEWAJIBAN				
8	Kewajiban jangka pendek	220,396,909	50	110,198,455
9	Kewajiban jangka panjang	2,583,435,030	50	1,291,717,515
JUMLAH				5,727,501,692

Sumber: Data Laporan Keuangan KPRI Ikhwan dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2013

Tabel 4.10
Perhitungan Modal Tertimbang KPRI Ikhwan tahun 2014

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Resiko (%)	Modal Tertimbang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
MODAL SENDIRI				
1	Modal Anggota			
	a. Simpanan pokok	13,980,000	100	6,025,000
	b. Simpanan wajib	3,759,082,989	100	3,600,653,518
	c. Simpanan usaha	752,192,922		
	d. Simpanan wajib khusus	271,844,448	100	272,632,520
2	Modal anggota		100	
3	Modal Penyetaraan	0	100	0
4	Modal Penyertaan	0	50	0
5	Donasi	3,925,000	100	3,925,000
6	Dana SHU Anggota	26,112,462	50	13,056,231
7	Cadangan umum	165,633,359	100	165,583,360

8	SHU belum dibagi	131,505,947	50	69,103,666
KEWAJIBAN				
9	Kewajiban jangka pendek	272, 894, 926	50	136,447,463
10	Kewajiban jangka panjang	1,490,177,542	50	745,088,771
JUMLAH				5,012,515,529

Sumber: Data Laporan Keuangan KPRI Ikhwan dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2014

Tabel 4.11
Perhitungan Modal Tertimbang KPRI Ikhwan tahun 2015

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Resiko (%)	Modal Tertimbang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
MODAL SENDIRI				
1	Modal Anggota			
	a. Simpanan pokok	6,095,000	100	6,095,000
	b. Simpanan wajib	4,013,302,851	100	4,013,302,851
	c. Simpanan wajib khusus	303,034,404	100	303,034,404
2	Modal anggota		100	0
3	Modal Penyertaan	0	100	0
4	Modal Penyetaraan	0	50	0
5	Donasi	3,925,000	100	3,925,000
6	Cadangan dana risiko	150,172,543	50	75,086,272
7	Cadangan umum	183,925,481	100	
8	SHU belum dibagi	152,196,165	50	76,098,083
KEWAJIBAN				
9	Kewajiban jangka pendek	1,621,205,497	50	810,602,749
10	Kewajiban jangka panjang	839,000,000	50	419,500,000
JUMLAH				5,707,644,359

Sumber: Data Laporan Keuangan KPRI Ikhwan dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2015

Tabel 4.12
Perhitungan Modal Tertimbang KPRI Ikhwan tahun 2016

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Resiko (%)	Modal Tertimbang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
MODAL SENDIRI				
1	Modal Anggota			
	a. Simpanan pokok	6,805,000	100	6,805,000
	b. Simpanan wajib	4,406,435,351	100	4,406,435,351
	c. Simpanan wajib khusus	363,496,100	100	363,496,100
2	Modal anggota	4,776,736,451	100	4,776,736,451
3	Modal Penyetaraan	0	100	0
4	Modal Penyertaan	0	50	0
5	Donasi	3,925,000	100	3,925,000
6	Cadangan dana risiko	136,068,895	50	68,034,448
7	Cadangan	204,365,910	100	204,365,910
8	SHU belum dibagi	111,546,988	50	55,773,494
KEWAJIBAN				
9	Kewajiban jangka pendek	1,291,480,003	50	645,740,002
10	Kewajiban jangka panjang	438,000,008	50	219,000,004
JUMLAH				10,750,311,760

Sumber: Data Laporan Keuangan KPRI Ikhwan dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2016

Data perhitungan ATMR (Aktiva Tertimbang menurut Resiko)
KPRI Ikhwan tahun 2012-2016:

Tabel 4.13
Perhitungan ATMR KPRI Ikhwan tahun 2012

Komponen	Nilai (Rp)	Bobot Resiko (%)	Aktiva Tertimbang (Rp)
Kas + Bank	30.615.019	0	0
Piutang	6.874.046.295	100	6.874.046.295

Aktiva tetap dan Inventaris	101. 621. 946	70	7.113. 536. 220
Jumlah	7.006.283.260		13.987. 582.515

Sumber: Data Laporan Keuangan KPRI Ikhwan dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2012

Tabel 4.14
Perhitungan ATMR KPRI Ikhwan tahun 2013

Komponen Aktiva	Nilai (Rp)	Bobot Resiko (%)	Aktiva Tertimbang (Rp)
Kas + Bank	173. 576. 304	0	0
Piutang	6.861.510.433	100	6.861.510.433
Aktiva tetap dan Inventaris	115.619.211	70	8.093.344.770
Jumlah	7.150.705.948		14.954.855.203

Sumber: Data Laporan Keuangan KPRI Ikhwan dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2013

Tabel 4.15
Perhitungan ATMR KPRI Ikhwan tahun 2014

Komponen Aktiva	Nilai (Rp)	Bobot Resiko (%)	Aktiva Tertimbang (Rp)
Kas + Bank	57,555,757	0	0
Piutang	6,571,821,578	100	6,571,821,578
Aktiva tetap dan Inventaris	77.972.260	70	5.458.058.200
Jumlah	6.707.349.595		12.029.879.778

Sumber: Data Laporan Keuangan KPRI Ikhwan dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2014

Tabel 4.16
Perhitungan ATMR KPRI Ikhwan tahun 2015

Komponen	Nilai (Rp)	Bobot Resiko (%)	Aktiva Tertimbang (Rp)
Kas + Bank	667,258,860	0	0
Piutang	5, 691,306, 361	100	561, 306, 361
Aktiva tetap dan inventaris	37.543.248	70	2.488.027.360
Jumlah	6.433.856.941		3.049.333.721

Sumber: Data Laporan Keuangan KPRI Ikhwan dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2015

Tabel 4.17
Perhitungan ATMR KPRI Ikhwan tahun 2016

Komponen	Nilai (Rp)	Bobot Resiko (%)	Aktiva Tertimbang (Rp)
Kas + Bank	303,889,694	0	0
Piutang	6,128,638,314	100	6,128,638,314
Aktiva tetap dan inventaris	38.207.200	70	2.674.504.000
Jumlah	6.524.123.247		8.803.142.314

Sumber: Data Laporan Keuangan KPRI Ikhwan dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2016

Untuk memperoleh rasio kecukupan modal sendiri ditetapkan sebagai berikut:

- a) Rasio kecukupan modal sendiri adalah perbandingan antara Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.

- b) Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- c) ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- d) Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
- e) Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100 %.

Tabel 4.18
Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 4	0	3	0.00
$4 \leq X < 6$	50	3	1.50
$6 \leq X \leq 8$	75	3	2.25
> 8	100	3	3.00

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Data perhitungan modal tertimbang terhadap ATMR KPRI Ikhwan tahun 2012-2016 sebagai berikut:

Tabel 4.19
Perhitungan Rasio Modal Sendiri Tertimbang terhadap ATMR KPRI Ikhwan tahun 2012-2016

Tahun	Modal Tertimbang (Rp)	ATMR (Rp)	Perhitungan Rasio Modal Tertimbang terhadap ATMR (%)
2012	5,072,984,381	13.987. 582.515	36.27
2013	5,601,450,175	14.954.855.203	37.45
2014	5,012,515,529	12.029.879.778	41.67
2015	5,707,644,359	3.049.333.721	187.17

2016	10,750, 311,760	8.803.142.314	122.11
------	-----------------	---------------	--------

Sumber : Data Laporan Keuangan KPRI Ikhwan dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2012-2016 yang telah diolah penulis

Dari perhitungan rasio modal sendiri tertimbang terhadap ATMR maka dilakukan penskoran sebagai berikut:

Tabel 4.20
Penskoran Rasio Modal Sendiri Tertimbang terhadap ATMR KPRI Ikhwan tahun 2012-2016

Tahun	Rasio Modal Tertimbang terhadap ATMR (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2012	36.27	100	3	3.00
2013	37.45	100	3	3.00
2014	41.67	100	3	3.00
2015	187.17	100	3	3.00
2016	122.11	100	3	3.00

Sumber: Perhitungan Rasio Modal Sendiri Tertimbang terhadap ATMR yang telah diolah penulis

Dari table diatas, dapat dilihat rasio modal sendiri terhadap total asset tahun 2012 adalah 36,27% , tahun 2013 adalah 37,45% dan tahun 2014 adalah 41,67%, tahun 2015 adalah 187,17% dan tahun 2016 adalah 122,11%. Karena rasio modal 2012 dan 2016 diantara > 8 dengan nilai 100 dan skor rasio modal sendiri terhadap total asset adalah 3.00. Rasio modal tertimbang terhadap ATMR dikatakan sehat dikarenakan sudah mencapai skor maksimal.

b. Kualitas Aktiva Produktif

- 1) Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman diberikan

Rumusnya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Volume Pinjaman pada Anggota}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$$

Data keuangan volume pinjaman pada anggota dan volume pinjaman KPRI Ikhwan tahun 2012-2016

Tabel 4.21
Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman KPRI Ikhwan tahun 2012-2016

Tahun	Volume Pinjaman pada anggota (Rp)	Volume Pinjaman (Rp)
2012	7.730.350.188	7.730.350.188
2013	6.782.966.942	6.782.966.942
2014	6.571.821.578	6.571.821.578
2015	5.612.385.769	5.612.385.769
2016	4.074.080.000	4.074.080.000

Sumber : Data Laporan Keuangan KPRI Ikhwan dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2012-2016

Data perhitungan volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman KPRI Ikhwan tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.22
Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Volume Pinjaman KPRI Ikhwan tahun 2012-2016

Tahun	Volume Pinjaman pada anggota (Rp)	Volume Pinjaman (Rp)	Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Volume Pinjaman (%)
--------------	--	-----------------------------	--

2012	7.730.350.188	7.730.350.188	100
2013	6.782.966.942	6.782.966.942	100
2014	6.571.821.578	6.571.821.578	100
2015	5.612.385.769	5.612.385.769	100
2016	4.074.080.000	4.074.080.000	100

Sumber : Data Laporan Keuangan KPRI Ikhwan dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2012-2016 yang telah diolah penulis

Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.23
Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 25	0	10	0.00
26 – 50	50	10	5.00
50 – 75	75	10	7.50
> 75	100	10	10.00

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Dari perhitungan rasio volume pinjaman pada anggota terhadap Volume pinjaman maka dilakukan penskoran sebagai berikut:

Tabel 4.24
Penskoran Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume pinjaman KPRI Ikhwan tahun 2012-2016

Tahun	Nilai	Bobot (%)	Skor
2012	100	10	10.00
2013	100	10	10.00
2014	100	10	10.00
2015	100	10	10.00
2016	100	10	10.00

Sumber: Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Volume Pinjaman diberikan yang telah diolah penulis

Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total pinjaman diberikan dapat dikatakan sehat karena sudah mencapai skor maksimal yaitu 10.00

- 2) Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman diberikan Rumusnya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pinjaman Bermasalah}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

Berdasarkan laporan KPRI Ikhwan jumlah pinjaman bermasalah diperoleh dari penjumlahan piutang macet, sedangkan pinjaman diberikan diperoleh dari jumlah saldo piutang.

Perhitungan penilaian :

- (1) Untuk rasio 45 % atau lebih diberi nilai 0;
- (2) Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45 % nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100;
- (3) Nilai dikalikan dengan bobot 5 % diperoleh skor penilaian.

Tabel 4.25
Standar Perhitungan RPM

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 45	0	5	0
$40 < X < 45$	10	5	0.5
$30 < X \leq 40$	20	5	1.0
$20 < X \leq 30$	40	5	2.0
$10 < X \leq 20$	60	5	3.0
$0 < X \leq 10$	80	5	4.0
0	100	5	5.0

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Data perhitungan rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan tahun 2012-2016 sebagai berikut:

Tabel 4.26
Perhitungan Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman diberikan KPRI Ikhwantahun 2012-2016

Tahun	Pinjaman Bermasalah	Pinjaman yang diberikan	Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang diberikan (%)
-------	---------------------	-------------------------	---

2012	32, 446, 300	6, 874, 046, 295	0.47
2013	74, 668, 300	6, 861, 510, 433	1.08
2014	65, 104, 800	6, 571, 821, 578	1.00
2015	373, 568, 150	5, 691, 306, 361	6.56
2016	707, 694, 737	6, 128, 638, 314	11.55

Sumber : Data Laporan Keuangan KPRI Ikhwan dari data perhitungan rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan maka dilakukan penskoran sebagai berikut:

Tabel 4.27

Penskoran Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman diberikan KPRI Ikhwan tahun 2012-2016

Tahun	Nilai	Bobot (%)	Skor
2012	100	5	5.0
2013	80	5	4.0
2014	80	5	4.0
2015	80	5	4.0
2016	60	5	3.0

Sumber: Perhitungan Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman diberikan KPRI Ikhwan tahun 2012-2016 yang telah diolah penulis

Dari tabel diatas, dapat dilihat rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan tahun 2012 sebesar 1,40%, tahun 2013 2,83%, tahun 2014 1,06%, tahun 2015 6,66%, tahun 2016 11,55%. Karena rasio pinjaman bermasalah 2012-2015 berada diantara $0 < X \leq 10$, dengan nilai 80 dan skor 4.0. sedangkan tahun 2016 rasio pinjaman bermasalah berada diantara $10 < X \leq 20$ dengan nilai 60 skor 3.0. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman diberikan belum dapat dikatakan sehat dikarenakan belum mencapai skor maximal yaitu 5.00.

3) Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

Rumusnya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Cadangan Risiko}}{\text{Pinjaman Bermasalah}} \times 100\%$$

Data keuangan cadangan risiko dan pinjaman bermasalah KPRI Ikhwan tahun 2012-2016 sebagai berikut

Tabel 4. 28
Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah KPRI
Ikhwantahun 2012-2016

Tahun	Cadangan Risiko (Rp)	Pinjaman Bermasalah (Rp)
2012	17, 605, 849	32, 446, 300
2013	605, 849	74, 668, 300
2014	13, 713, 500	65, 104, 800
2015	4, 729, 254	373, 568, 150
2016	4, 729, 254	707, 694, 737

Sumber : Data Laporan Keuangan KPRI Ikhwan dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2012-2016

Data perhitungan rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah tahun 2012-2016 sebagai berikut:

Tabel 4. 29
Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah
KPRI Ikhwantahun 2012-2016

Tahun	Cadangan Risiko (Rp)	Pinjaman Bermasalah (Rp)	Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah (%)
2012	17, 605, 849	32, 446, 300	54, 24
2013	605, 849	74, 668, 300	0, 81
2014	13, 713, 500	65, 104, 800	21, 06
2015	4, 729, 254	373, 568, 150	1, 26

2016	4, 729, 254	707, 694, 737	0, 67
------	-------------	---------------	-------

Sumber : Data Laporan Keuangan KPRI Ikhwan dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2012-2016 yang telah diolah penulis

Rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0;
- b) Untuk setiap kenaikan 1 % mulai dari 0 %, nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100;
- c) Nilai dikalikan bobot sebesar 5 % diperoleh skor.

Tabel 4.30
Standar Perhitungan Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
1 – 10	10	5	0.5
11 –20	20	5	1.0
21– 30	30	5	1.5
31– 40	40	5	2.0
41– 50	50	5	2.5
51–60	60	5	3.0
61– 70	70	5	3.5
71– 80	80	5	4.0
81– 90	90	5	4.5
91– 100	100	5	5.0

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Dari perhitungan rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah maka dilakukan penskoran sebagai berikut:

Tabel 4.31
Penskoran Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah KPRI Ikhwan tahun 2012-2016

Tahun	Nilai	Bobot (%)	Skor
2012	54, 24	5	3.0
2013	0, 81	5	0
2014	21, 06	5	1.5
2015	1, 26	5	0.5

2016	0,67	5	0
------	------	---	---

Sumber: Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah yang telah diolah penulis

Dari tabel diatas, dapat dilihat rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah tahun 2012 adalah 54,24% berada pada kisaran 51- 60 dengan nilai 60 bobot 5 dengan nilai skor 3.0. Pada tahun 2013 adalah 0,81% berada pada kisaran 0 dengan nilai 0 bobot 5 dengan nilai skor 0. Pada tahun 2014 adalah 21,06% berada pada kisaran 21 - 30 dengan nilai 30 bobot 5 dengan nilai skor 1.5. tahun 2015 adalah 1,26% berada pada kisaran 1 - 10 dengan nilai 10 bobot 5 dengan nilai skor 0.5. Sedangkan pada tahun 2016 adalah 0,67% berada pada kisaran 0 dengan nilai 0 bobot 5 nilai skor 0. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah belum dapat dikatakan sehat dikarenakan belum dapat mencapai skor maksimal yaitu 5.00.

- 4) Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang diberikan
Rumusnya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pinjaman yang Berisiko}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

Data keuangan pinjaman yang berisiko dan pinjaman yang diberikan KPRI Ikhwan tahun 2012-2016 sebagai berikut:

Tabel 4. 32
Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan KPRI Ikhwan tahun 2012-2016

Tahun	Pinjaman Berisiko (Rp)	Pinjaman yang diberikan (Rp)
2012	6. 856. 440. 446	6, 874, 046, 295
2013	6. 860. 904. 584	6, 861, 510, 433
2014	6. 558. 108. 078	6, 571, 821, 578

2015	5. 686. 577. 107	5, 691, 306, 361
2016	6. 123. 909. 060	6, 128, 638, 314

Sumber : Data Laporan Keuangan KPRI Ikhwan dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2012-2016

Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 4.33
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 30	25	5	1.25
26 – 30	50	5	2.50
21 – 25	75	5	3.75
< 21	100	5	5.00

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Data perhitungan rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan tahun 2012-2016 sebagai berikut:

Tabel 4. 34
Perhitungan Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap pinjaman yang diberikan KPRI Ikhwan tahun 2012-2016

Tahun	Pinjaman Berisiko (Rp)	Pinjaman yang diberikan (Rp)	Perhitungan Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang diberikan (%)
2012	6. 856. 440. 446	6, 874, 046, 295	99.74
2013	6. 860. 904. 584	6, 861, 510, 433	99.99
2014	6. 558. 108. 078	6, 571, 821, 578	99.79
2015	5. 686. 577. 107	5, 691, 306, 361	99.92
2016	6. 123. 909. 060	6, 128, 638, 314	99.92

Sumber : Data Laporan Keuangan KPRI Ikhwan dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2012-2016 yang telah diolah penulis

Dari perhitungan rasiopinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan maka dilakukan penskoran sebagai berikut:

Tabel 4.35
Penskoran Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang diberikan KPRI Ikhwan tahun 2012-2016

Tahun	Nilai	Bobot (%)	Skor
2012	25	5	1.25
2013	25	5	1.25
2014	25	5	1.25
2015	25	5	1.25
2016	25	5	1.25

Sumber: Perhitungan Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang diberikan yang telah diolah penulis

Dari tabel diatas, dapat dilihat rasio pinjaman berisiko terhadap pinjaman yang diberikan pada tahun 2012-2016 berada pada kisaran $< .30$ maka diperoleh nilai 100 dengan skor 5.00. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang diberikan belum dapat dikatakan sehat dikarenakan belum mencapai skor maksimal yaitu 5.00.

c. Manajemen

Perhitungan nilai didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut :

- 1) Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
- 2) Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
- 3) Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
- 4) Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

5) Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

a) Manajemen Umum

Tabel 4. 36
Standar Perhitungan Manajemen Umum

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0.25
2	0.50
3	0.75
4	1.00
5	1.25
6	1.50
7	1.75
8	2.00
9	2.25
10	2.50
11	2.75
12	3.00

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Dilihat dari hasil penelitian atas jawaban “Ya” pada pernyataan aspek Manajemen Umum yang diberikan kepada 3 orang responden yang terdiri dari 12 pertanyaan maka didapat skor sebagai berikut:

Tabel 4.37
Penskoran Manajemen Umum KPRI Ikhwan tahun 2012-2016

Tahun	Jawaban “Ya”	Skor
2012	11	2.75
2013	11	2.75
2014	11	2.75
2015	11	2.75
2016	11	2.75

Sumber: Data wawancara dengan pengurus KPRI Ikhwan

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat pada tahun 2012-2016 dengan jumlah jawaban “ya” sebanyak 11 berarti aspek manajemen umum mendapat skor 2.75.

b) Manajemen Kelembagaan

Tabel 4.38
Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0.50
2	1.00
3	1.50
4	2.00
5	2.50
6	3.00

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Dilihat dari hasil penelitian atas jawaban “Ya” pada pernyataan aspek Manajemen Kelembagaan yang diberikan kepada 3 orang responden yang terdiri dari 6 pertanyaan maka didapat skor sebagai berikut:

Tabel 4.39
Penskoran Manajemen Kelembagaan KPRI Ikhwan tahun 2012-2016

Tahun	Jawaban “Ya”	Skor
2012	6	3.00
2013	6	3.00
2014	6	3.00
2015	6	3.00
2016	6	3.00

Sumber: Data wawancara dengan pengurus KPRI Ikhwan

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat pada tahun 2012-2016 dengan jumlah jawaban “ya” sebanyak 6 berarti aspek manajemen kelembagaan mendapat skor 3.00.

c) Manajemen permodalan

Tabel 4. 40
Standar Perhitungan Manajemen Permodalan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0.60
2	1.20
3	1.80
4	2.40
5	3.00

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/201

Dilihat dari hasil penelitian atas jawaban “Ya” pada pernyataan aspek Manajemen Permodalan yang diberikan kepada 3 orang responden yang terdiri dari 5 pertanyaan maka didapat skor sebagai berikut:

Tabel 4.41
Penskoran Manajemen Permodalan KPRI Ikhwan tahun 2012-2016

Tahun	Jawaban “Ya”	Skor
2012	4	2.40
2013	4	2.40
2014	4	2.40
2015	4	2.40
2016	4	2.40

Sumber: Data wawancara dengan pengurus KPRI Ikhwan

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat pada tahun 2012-2016 dengan jumlah jawaban “ya” sebanyak 4 berarti aspek manajemen permodalan mendapat skor 2.40.

d) Manajemen Aktiva

Tabel 4. 42
Standar Perhitungan Manajemen Aktiva

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0.30
2	0.60
3	0.90
4	1.20
5	1.50
6	1.80
7	2.10
8	2.40
9	2.70
10	3.00

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Dilihat dari hasil penelitian atas jawaban “Ya” pada pernyataan aspek Manajemen Aktiva yang diberikan kepada 3 orang responden yang terdiri dari 10 pertanyaan maka didapat skor sebagai berikut:

Tabel 4. 43
Penskoran Manajemen Aktiva KPRI Ikhwan tahun 2012-2016

Tahun	Jawaban “Ya”	Skor
2012	5	1.50

2013	5	1.50
2014	5	1.50
2015	5	1.50
2016	5	1.50

Sumber: Data wawancara dengan pengurus KPRI Ikhwan

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat pada tahun 2012-2016 dengan jumlah jawaban “ya” sebanyak 5 berarti aspek manajemen aktiva mendapat skor 1.50.

e) Manajemen Likuiditas

Tabel 4. 44
Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0.60
2	1.20
3	1.80
4	2.40
5	3.00

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Dilihat dari hasil penelitian atas jawaban “Ya” pada pernyataan aspek Manajemen Aktiva yang diberikan kepada 3 orang responden yang terdiri dari 5 pertanyaan maka didapat skor sebagai berikut:

Tabel 4. 45
Penskoran Manajemen Likuiditas KPRI Ikhwan tahun 2012-2016

Tahun	Jawaban “Ya”	Skor
2012	4	2.40
2013	4	2.40
2014	4	2.40
2015	4	2.40
2016	4	2.40

Sumber: Data wawancara dengan pengurus KPRI Ikhwan

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat pada tahun 2012-2016 dengan jumlah jawaban “ya” sebanyak 4 berarti aspek manajemen Likuiditas mendapat skor 2.40.

d. Efisiensi

Penilaian kesehatan dari aspek efisiensi adalah sebagai berikut:

1) Rasio Beban Operasi Anggota atas Partisipasi Bruto

Rumusnya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Beban Operasi Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$$

Data keuangan beban operasi anggota dan partisipasi bruto KPRI Ikhwan tahun 2012-2016 sebagai berikut:

Tabel 4. 46
Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi KPRI Ikhwan tahun 2012-2016

Tahun	Beban Operasi Anggota (Rp)	Partisipasi Bruto (Rp)
2012	373, 025, 000	947.659.226
2013	300, 291, 989	954.654.091
2014	245, 201, 754	904.326.138
2015	261, 244, 934	811.321.336
2016	58, 616, 000	806.197.411

Sumber : Data Laporan Keuangan KPRI Ikhwan dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2012-2016

Data perhitungan rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto tahun 2012-2016 sebagai berikut:

Tabel 4. 47
Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto KPRI Ikhwan tahun 2012-2016

Tahun	Beban Operasi Anggota (Rp)	Partisipasi Bruto (Rp)	Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto (%)
2012	373.025.000	947.659.226	39.36
2013	300. 291. 989	954.654.091	31.46
2014	245.201.754	904.326.138	27.11
2015	261.244.934	811.321.336	32.19
2016	58.616.000	806.197.411	7.27

Sumber : Data Laporan Keuangan KPRI Ikhwan dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2012-2016 yang telah diolah penulis

Cara perhitungan rasio beban operasi anggota atas partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95 persen hingga lebih kecil dari 100% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 4. 48
Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 100	0	4	1
$95 \leq x < 100$	50	4	2
$90 \leq x < 95$	75	4	3
$0 \leq x < 90$	100	4	4

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Dari perhitungan rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto tahun 2012-2016 maka dilakukan penskoran sebagai berikut:

Tabel 4. 49
Penskoran Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto KPRI Ikhwan tahun 2012-2016

Tahun	Nilai	Bobot (%)	Skor
2012	100	4	4.00
2013	100	4	4.00
2014	100	4	4.00
2015	100	4	4.00
2016	100	4	4.00

Sumber: Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto yang telah diolah penulis

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto pada tahun 2012 – 2016 dapat dikatakan sehat karena sudah mencapai skor maksimal yaitu 4.00 dan berada pada kisaran $0 \leq x < 90$ maka diperoleh nilai 100 dengan skor 4.00.

2) Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Rumusnya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$$

Data keuangan beban usaha dan SHU kotor KPRI Ikhwan tahun 2012-2016 sebagai berikut:

Tabel 4. 50
Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor KPRI Ikhwan tahun 2012-2016

Tahun	Beban Usaha (Rp)	SHU Kotor (Rp)
2012	865, 221, 882	107, 402, 846
2013	890, 510, 596	107,962, 988
2014	791, 008, 990	131, 505, 947
2015	701, 408, 313	144, 382, 845
2016	752, 223, 361	103, 682, 429

Sumber : Data Laporan Keuangan KPRI Ikhwan dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2012-2016

Data perhitungan beban usaha dan SHU kotor KPRI Ikhwan tahun 2012-2016 sebagai berikut :

Tabel 4. 51
Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor KPRI Ikhwan tahun 2012-2016

Tahun	Beban Usaha (Rp)	SHU Kotor (Rp)	Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor (%)
-------	------------------	----------------	--

2012	865, 221, 882	107, 402, 846	805,60
2013	890, 510, 596	107,962, 988	824,83
2014	791, 008, 990	131, 505, 947	601,50
2015	701, 408, 313	144, 382, 845	485,79
2016	752, 223, 361	103, 682, 429	725,51

Sumber : Data Laporan Keuangan KPRI Ikhwan dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2012-2016 yang telah diolah penulis

Rasio beban usaha terhadap SHU kotor ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian

Tabel 4. 52

Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>80	25	4	1.00
$60 < x \leq 80$	50	4	2.00
$40 < x \leq 60$	75	4	3.00
≤ 40	100	4	4.00

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Dari data perhitungan beban usaha dan SHU kotor KPRI Ikhwan tahun 2012-2016 maka dilakukan penskoran sebagai berikut:

Tabel 4. 53

Penskoran Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor KPRI Ikhwan tahun 2012-2016

Tahun	Nilai	Bobot (%)	Skor
2012	100	4	4.00
2013	100	4	4.00
2014	100	4	4.00
2015	100	4	4.00

2016	100	4	4.00
------	-----	---	------

Sumber: Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor yang telah diolah penulis

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat rasio beban usaha terhadap SHU kotor pada tahun 2012 805, 60%, tahun 2013 824,83%, tahun 2014 601,50%, tahun 2015 485,79%, tahun 2016 725,51%. Rasio usaha terhadap SHU kotor pada tahun 2012-2016 berada pada kisaran >80 maka diperoleh nilai 25 dengan skor 1.00. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor sudah dapat dikatakan sehat karena sudah mencapai skor maximal yaitu 4.00.

3) Rasio Efisiensi Pelayanan

Rumusnya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$$

Data keuangan biaya karyawan dan volume pinjaman KPRI Ikhwan tahun 2012-2016 sebagai berikut:

Tabel 4. 54
Rasio Efisiensi Pelayanan KPRI Ikhwan tahun 2012-2016

Tahun	Biaya Karyawan (Rp)	Volume Pinjaman (Rp)
2012	86, 709, 500	7.730. 350. 188
2013	133, 025, 800	6.782.966.942
2014	162, 429, 500	6.571. 821.578
2015	181, 498, 500	5.612.385.769
2016	236, 050, 800	4.074. 080. 000

Sumber : Data Laporan Keuangan KPRI Ikhwan dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2012-2016

Data perhitungan rasio efisiensi pelayanan KPRI Ikhwan tahun 2012-2016 sebagai berikut:

Tabel 4. 55
Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan KPRI Ikhwan tahun 2012-2016

Tahun	Biaya Karyawan (Rp)	Volume Pinjaman (Rp)	Rasio Efisiensi Pelayanan (%)
2012	86, 709, 500	7.730. 350. 188	1.12
2013	133, 025, 800	6.782.966.942	1.96
2014	162, 429, 500	6.571. 821.578	2.47
2015	181, 498, 500	5.612.385.769	3.23
2016	236, 050, 800	4.074. 080. 000	5.80

Sumber : Data Laporan Keuangan KPRI Ikhwan dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2012-2016 yang telah diolah penulis

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman, dan ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio lebih dari 15 persen diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10 persen hingga 15 persen diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1 persen nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian.

Tabel 4. 56
Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio Efisiensi Staf (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	100	2	2.0
5 < x < 10	75	2	1.5
10 ≤ x ≤ 15	50	2	1.0
> 15	0	2	0.0

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Dari data perhitungan rasio efisiensi pelayanan KPRI Ikhwan tahun 2012-2016 maka dilakukan penskoran sebagai berikut:

Tabel 4. 57
Penskoran Rasio Efisiensi Pelayanan KPRI Ikhwan
tahun 2012-2016

Tahun	Rasio	Nilai	Bobot (%)	Skor
2012	1.12	100	2	2.00
2013	1.96	100	2	2.00
2014	2.47	100	2	2.00
2015	3.23	100	2	2.00
2016	5.80	75	2	1.5

Sumber: Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor yang telah diolah penulis

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat rasio efisiensi pelayanan pada tahun 2012 – 2016 belum dapat dikatakan sehat dikarenakan masih jauh dari skor maximal yaitu 4.00, sedangkan skor yang dicapai hanya 2.00.

e. Likuiditas

Penilaian kesehatan dari aspek likuiditas adalah sebagai berikut:

1) Rasio Kas Bank terhadap kewajiban lancar

Rumusnya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

Data keuangan kas bank dan kewajiban lancar KPRI Ikhwan tahun 2012-2016 sebagai berikut:

Tabel 4. 58
Rasio Kas KPRI Ikhwan terhadap Kewajiban
Lancar tahun 2012-2016

Tahun	Kas + Bank (Rp)	Kewajiban Lancar (Rp)
2012	30.615.019	295, 311, 006
2013	173.576.304	220, 396, 909
2014	57.555.757	272, 894, 926

2015	667.258.860	1, 621, 205, 497
2016	303.889.694	1,291, 480, 002

Sumber :Data Laporan Keuangan KPRI Ikhwan dalam RAT (Rapat AnggotaTahunan) tahun 2012-2016

Data perhitungan rasio kas KPRI Ikhwan tahun2012-2016 sebagai berikut:

Tabel 4. 59
Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar KPRI Ikhwan tahun 2012-2016

Tahun	Kas + Bank (Rp)	wajiban Lancar (Rp)	asio Kas (%)
2012	30.615.019	295, 311, 006	10.36
2013	173.576.304	220, 396, 909	78.76
2014	57.555.757	272, 894, 926	21.09
2015	667.258.860	1, 621, 205, 497	41.16
2016	303.889.694	1,291, 480, 002	23.53

Sumber : Data Laporan Keuangan KPRI Ikhwan dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2012-2016 yang telah diolah penulis

Rasio Kas Bank terhadap kewajiban lancar ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio kas lebih besar dari 10 % hingga 15 % diberi nilai 100, untuk rasio lebih besar dari 15 % sampai dengan 20 % diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10 % diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20 % diberi nilai 25.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

Tabel 4. 60
Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar

Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 10	25	10	2.5
$10 < x \leq 15$	100	10	1.00
$15 < x \leq 20$	50	10	5.00
> 20	25	10	2.5

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Dari data perhitungan rasio kas KPRI Ikhwan tahun 2012-2016 maka dilakukan penskoran sebagai berikut:

Tabel 4. 61
Penskoran Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar
KPRI Ikhwan tahun 2012-2016

Tahun	Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2012	10.36	100	10	1.00
2013	78.76	25	10	2.50
2014	21.09	25	10	2.50
2015	41.16	25	10	2.50
2016	23.53	25	10	2.50

Sumber: Perhitungan Rasio Kas yang diolah penulis

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat rasio kas pada tahun 2012 berada pada kisaran $10 < x \leq 15$ dengan nilai 1.00 dan 2013-2016 berada pada kisaran > 20 maka diperoleh nilai 25 dengan skor 2.50.

2) Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang diterima

Rumusnya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$$

Data Keuangan Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang diterima KPRI Ikhwan tahun 2012-2016 sebagai berikut:

Tabel 4. 62
Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang diterima KPRI
Ikhwan tahun 2012-2016

Tahun	Pinjaman yang diberikan (Rp)	Dana yang diterima (Rp)
2012	6, 874, 046, 295	6,898, 880, 414

2013	6, 861, 510, 433	7, 042 742, 960
2014	6, 571, 821, 578	6, 575, 843, 648
2015	5, 691, 306, 361	6, 417, 930, 407
2016	6, 128, 638, 314	6, 412,576, 259

Sumber : Data Laporan Keuangan KPRI Ikhwan dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2012-2016

Data perhitungan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima KPRI Ikhwan tahun 2012-2016 sebagai berikut:

Tabel 4. 63
Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang diterima KPRI Ikhwan tahun 2012-2016

Tahun	Pinjaman yang diberikan (Rp)	Dana yang diterima (Rp)	Perhitungan Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang diterima (%)
2012	6, 874, 046, 295	6,898, 880, 414	99.64
2013	6, 861, 510, 433	7, 042, 742, 960	97.43
2014	6, 571, 821, 578	6, 575, 843, 648	99.93
2015	5, 691, 306, 361	6, 417, 930, 407	88.68
2016	6, 128, 638, 314	6, 412,576, 259	95.57

Sumber : Data Laporan Keuangan KPRI Ikhwan dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2012-2016 yang telah diolah penulis

Catatan : Dana yang diterima adalah total passiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi.

Pengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10 % nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 4. 64
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang
diberikan terhadap Dana yang Diterima

Rasio Pinjaman (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 60	25	5	1.25
$60 \leq x < 70$	50	5	2.50
$70 \leq x < 80$	75	5	3.75
$80 \leq x < 90$	100	5	5.00

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Dari data perhitungan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima KPRI Ikhwan tahun 2012-2016 maka dilakukan penskoran sebagai berikut:

Tabel 4. 65
Penskoran Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang
diterima KPRI Ikhwan tahun 2012-2016

Tahun	Nilai	Bobot (%)	Skor
2012	100	5	5.00
2013	100	5	5.00
2014	100	5	5.00
2015 _u m	100	5	5.00
2016 _d e	100	5	5.00

: Penskoran Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang diterima yang diolah oleh penulis

Dari tabel diatas, maka dapat dilihat rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima pada tahun 2012 99,64%, tahun 2013 97,43%, tahun 2014 99,93%, tahun 2015 88,68%, dan pada tahun 2016 95,57%. Untuk rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima tahun 2012-2016 berada pada kisaran $80 \leq x < 90$ dengan nilai 100 skor 5.00.

f. Kemandirian dan Pertumbuhan

1) Rentabilitas Aset

Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{SHU Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Data keuangan SHU sebelum pajak dan total aset Koperasi KPRI Ikhwan tahun 2012-2016 sebagai berikut:

Tabel 4. 66
Data Keuangan KPRI Ikhwan tahun 2012-2016

Tahun	SHU sebelum pajak (Rp)	Total Aset (Rp)
2012	107, 402, 846	7, 006, 283, 260
2013	107, 962, 988	7, 150, 705, 948
2014	131, 505, 947	6, 707, 349, 595
2015	144, 382, 845	6, 433, 856, 941
2016	103, 682, 429	6, 524, 123, 247

Sumber : Data Laporan Keuangan KPRI Ikhwan dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2012-2016

Data perhitungan rasio rentabilitas aset KPRI Ikhwan tahun 2012-2016 sebagai berikut:

Tabel 4. 67
Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset KPRI Ikhwan tahun 2012-2016

Tahun	SHU sebelum pajak (Rp)	Total Aset (Rp)	Rasio Rentabilitas Aset(%)
2012	107, 402, 846	7, 006, 283, 260	1, 53
2013	107, 962, 988	7, 150, 705, 948	1,50
2014	131, 505, 947	6, 707, 349, 595	1,96
2015	144, 382, 845	6, 433, 856, 941	2,24
2016	103, 682, 429	6, 524, 123, 247	1,59

Sumber : Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset tahun 2012-2016 yang diolah penulis

Rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total asset, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian

Tabel 4. 68
Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas
Asset

Rasio Rentabilitas Asset (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	25	3	0.75
$5 \leq x < 7.5$	50	3	1.50
$7.5 \leq x < 10$	75	3	2.25
≥ 10	100	3	3.00

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Dari data perhitungan rasio rentabilitas asset KPRI Ikhwan tahun 2012-2016 maka dilakukan penskoran sebagai berikut:

Tabel 4. 69
Penskoran Rasio Rentabilitas Asset KPRI Ikhwan
tahun 2012-2016

Tahun	Nilai	Bobot (%)	Skor
2012	25	3	0.75
2013	25	3	0.75
2014	25	3	0.75
2015	25	3	0.75
2016	25	3	0.75

Sumber: Penskoran Rasio Rentabilitas Asset yang diolah oleh penulis

Berdasarkan table diatas, maka dapat dilihat rasio rentabilitas asset pada tahun 2012 adalah 1,53%, tahun 2013 1,50%, tahun

2014 1,96%, tahun 2015 2,24%, dan tahun 2016 1,59%. Untuk rasio rentabilitas asset tahun 2012-2016 berada pada kisaran <5 mendapat nilai 25 dengan skor 0.75.

2) Rentabilitas Modal Sendiri

Rumusnya sebagai berikut:

$$\frac{\text{SHU bagian Anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Data keuangan SHU bagian anggota dan total modal sendiri KPRI Ikhwan tahun 2012-2016 sebagai berikut:

Tabel 4. 70
Data Keuangan KPRI Ikhwan tahun 2012-2016

Tahun	SHU bagian Anggota (Rp)	Total Modal Sendiri (Rp)
2012	155. 907. 343	3, 751, 245, 681
2013	64. 777. 793	4, 283, 911, 021
2014	78. 903. 568	4, 812, 771, 180
2015	81. 761. 779	4, 812, 651, 444
2016	57. 372. 273	5, 232, 643, 244

Sumber : Data Laporan Keuangan KPRI Ikhwan dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2012-2016

Data perhitungan rasio rentabilitas modal sendiri KPRI Ikhwan tahun 2012-2016 sebagai berikut:

Tabel 4. 71
Perhitungan Rentabilitas Modal Sendiri tahun 2012-2016

Tahun	SHU bagian Anggota (Rp)	Total Modal Sendiri (Rp)	Rasio Rentabilitas Modal Sendiri (%)
2012	155. 907. 343	3, 751, 245, 681	4.15
2013	64. 777. 793	4, 283, 911, 021	1.51
2014	78. 903. 568	4, 812, 771, 180	1.64

2015	81.761.779	4,812,651,444	1.69
2016	57.372.273	5,232,643,244	1.09

Sumber : Perhitungan Rasio Rentabilitas Modal Sendiri tahun 2012-2016 yang diolah penulis

Rentabilitas modal sendiri yaitu SHU bagian anggota dibandingkan total modal sendiri, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1 % nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 4.72
Standar Perhitungan untuk Ratio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0.75
$3 \leq x < 4$	50	3	1.50
$4 \leq x < 5$	75	3	2.25
≥ 5	100	3	3.00

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Dari data perhitungan rasio rentabilitas modal sendiri KPRI Ikhwan tahun 2012-2016 maka dilakukan penskoran sebagai berikut:

Tabel 4.73
Penskoran Rentabilitas Modal Sendiri KPRI Ikhwan tahun 2012-2016

Tahun	Nilai	Bobot (%)	Skor
2012	75	3	2.25
2013	25	3	0.75
2014	25	3	0.75
2015	25	3	0.75
2016	25	3	0.75

Sumber: Penskoran Rasio Rentabilitas Modal Sendiri yang diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat rasio rentabilitas modal sendiri pada tahun 2012 4,15%, tahun 2013 1,51%, tahun 2014 1,64%, tahun 2015 1,69%, dan tahun 2016 1,09%. Untuk rasio rentabilitas modal sendiri tahun 2012 berada pada kisaran $4 \leq x < 5$ mendapat nilai 75 dengan skor 2.25. sedangkan pada tahun 2013-2016 berada pada kisaran < 3 mendapat nilai 3 dengan skor 0.75.

3) Kemandirian Operasional Pelayanan

Rumusnya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Partisipasi Neto}}{\text{Beban Usaha + Beban Perkoperasian}} \times 100\%$$

Data keuangan partisipasi neto dan beban usaha + beban perkoperasian KPRI Ikhwan tahun 2012-2016 sebagai berikut:

Tabel 4. 74
Data Keuangan KPRI Ikhwan tahun 2012-2016

Tahun	Partisipasi Neto (Rp)	Beban Usaha + Beban Perkoperasian (Rp)
2012	107.402.846	865, 221, 882
2013	107.962.988	890, 510, 596
2014	131.505.947	791, 008, 990
2015	144.382.845	701, 408, 313
2016	103.682.429	752, 223, 361

Sumber : Data Laporan Keuangan KPRI Ikhwan dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2012-2016

Data perhitungan rasio kemandirian operasional pelayanan KPRI Ikhwan tahun 2012-2016 sebagai berikut:

Tabel 4. 75
Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan tahun 2012-2016

Tahun	Partisipasi Neto (Rp)	Beban Usaha + Beban Perkoperasian (Rp)	Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan (%)
2012	107.402.846	865, 221, 882	12.41
2013	107.962.988	890, 510, 596	12.12
2014	131.505.947	791, 008, 990	16.63
2015	144.382.845	701, 408, 313	20.58
2016	103.682.429	752, 223, 361	13.78

Sumber : Perhitungan Rasio Rentabilitas Modal Sendiri tahun 2012-2016 yang diolah penulis

Rasio kemandirian operasional yaitu Partisipasi Netto dibandingkan Beban Usaha ditambah beban perkoperasian, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100 % diberi nilai 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 4.76
Standar Perhitungan Ratio Kemandirian Operasional

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 100	0	4	0
> 100	100	4	4

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Dari data perhitungan rasio kemandirian operasional pelayanan KPRI Ikhwan tahun 2012-2016 maka dilakukan penskoran sebagai berikut:

Tabel 4. 77
Penskoran Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan KPRI Ikhwan
tahun 2012-2016

Tahun	Nilai	Bobot (%)	Skor
2012	0	4	0
2013	0	4	0
2014	0	4	0
2015	0	4	0
2016	0	4	0

Sumber: Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan yang diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat rasio kemandirian operasional pada tahun 2012-2016 berada pada kisaran ≤ 100 mendapat nilai 0 dengan skor 0.

g. Jatidiri Koperasi

1) Rasio Partisipasi Bruto

Rumusnya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Partisipasi Bruto} + \text{Pendapatan}} \times 100\%$$

Data keuangan partisipasi bruto dan partisipasi bruto + pendapatan KPRI Ikhwan tahun 2012-2016 sebagai berikut:

Tabel 4. 78
Data Keuangan KPRI Ikhwan tahun 2012-2016

Tahun	Partisipasi Bruto (Rp)	Partisipasi Bruto + Pendapatan (Rp)
2012	947.659.226	1.920.283.954
2013	954.654.091	1.953.127.675
2014	904.326.138	1.826.841.075

2015	811.321.336	1.657.112.494
2016	806.197.411	1.662.103.201

Sumber : Data Laporan Keuangan KPRI Ikhwan dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2012-2016

Data perhitungan rasio partisipasi bruto KPRI Ikhwan tahun 2012-2016 sebagai berikut:

Tabel 4. 79
Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto tahun 2012-2016

Tahun	Partisipasi Bruto (Rp)	Partisipasi Bruto + Pendapatan (Rp)	Rasio Partisipasi Bruto (%)
2012	947.659.226	1.920.283.954	49.35
2013	954.654.091	1.953.127.675	48.88
2014	904.326.138	1.826.841.075	49.50
2015	811.321.336	1.657.112.494	48.95
2016	806.197.411	1.662.103.201	48.51

Sumber : Data Laporan Keuangan KPRI Ikhwan dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2012-2016 yang telah diolah penulis

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto.

Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 7 % diperoleh skor penilaian.

Tabel 4. 80
Standar Perhitungan sebagai berikut :

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7	1.75
$25 \leq x < 50$	50	7	3.50
$50 \leq x < 75$	75	7	5.25
≥ 75	100	7	7

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Dari data perhitungan rasio partisipasi bruto KPRI Ikhwan tahun 2012-2016 maka dilakukan penskoran sebagai berikut:

Tabel 4. 81
Penskoran Rasio Partisipasi Bruto KPRI Ikhwan tahun 2012-2016

Tahun	Nilai	Bobot (%)	Skor
2012	50	7	3.50
2013	50	7	3.50
2014	50	7	3.50
2015	50	7	3.50
2016	50	7	3.50

Sumber: Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto yang diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat rasio partisipasi bruto pada tahun 2012-2016 adalah nilai 50 dan berada pada kisaran $25 \leq x < 50$ maka diperoleh dengan skor 3.50.

2) Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{PEA}}{\text{Simpanan Pokok} + \text{Simpanan Wajib}} \times 100\%$$

Data keuangan PEA (Promosi Ekonomi Anggota) dan simpanan pokok + simpanan wajib KPRI Ikhwan tahun 2012-2016 sebagai berikut :

Tabel 4. 82
Data Keuangan KPRI Ikhwan tahun 2012-2016

Tahun	PEA (Promosi Ekonomi Anggota) (Rp)	Simpanan Pokok + Simpanan Wajib (Rp)
2012	528.932.343	2, 783, 736, 579
2013	365.069.782	3, 143, 524, 840
2014	324.105.322	3, 593, 062, 989
2015	343.006.713	4, 019, 397, 851
2016	115.988.273	4,413, 240, 351

Sumber : Data Laporan Keuangan KPRI Ikhwan dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2012-2016

Data perhitungan rasio PEA (Promosi Ekonomi Anggota)KPRI Ikhwan tahun 2012-2016 sebagai berikut:

Tabel 4. 83
Perhitungan Rasio PEA (Promosi Ekonomi Anggota)tahun 2012-2016

Tahun	PEA (Promosi Ekonomi Anggota) (Rp)	Simpanan Pokok + Simpanan Wajib (Rp)	Rasio PEA (%)
2012	528.932.343	2, 783, 736, 579	19.00
2013	365.069.782	3, 143, 524, 840	11.61
2014	324.105.322	3, 593, 062, 989	9.02
2015	343.006.713	4, 019, 397, 851	8.53
2016	115.988.273	4,413, 240, 351	2.63

Sumber : Perhitungan Rasio PEA (Promosi Ekonomi Anggota) tahun 2012-2016 yang diolah oleh penulis

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan

simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik.

Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib, yang ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2,5%, nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 3 %, diperoleh skor penilaian.

Tabel 4. 84
Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi
Anggota

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	0	3	0.00
$5 \leq x < 7.5$	50	3	1.50
$7.5 \leq x < 10$	75	3	2.25
≥ 10	100	3	3.00

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Dari data perhitungan rasio PEA (Promosi Ekonomi Anggota) KPRI Ikhwan tahun 2012-2016 maka dilakukan pembobotan sebagai berikut:

Tabel 4. 85
Penskoran Rasio PEA (Promosi Ekonomi Anggota) KPRI
Ikhwan tahun 2012-2016

Tahun	Nilai	Bobot (%)	Skor
2012	100	3	3.00
2013	100	3	3.00
2014	75	3	2.5
2015	75	3	2.5

2016	0	3	0
------	---	---	---

Sumber: Perhitungan Rasio PEA (Promosi Ekonomi Anggota) yang telah diolah penulis

Dari tabel diatas, maka dapat dilihat Rasio Promosi Ekonomi Anggota pada tahun dari tahun 2012 – 2016 belum dapat dikatakan sehat dikarenakan belum mencapai skor maximal yaitu 3.00.

Tabel 4. 86
Rangkuman Penilaian Kinerja Koperasi Unit Simpan Pinjam (KPRI) Ikhwan tahun 2012 - 2016

No	Aspek	Skor Maksimal	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	PERMODALAN						
	a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset	6	6.00	6.00	3.00	3.00	1.50
	b. Rasio Modal Sendiri terhadap pinjaman yang diberikan yang Berisiko	6	3.6	4.2	4.8	5.4	5.4
	c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri	3	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
2	KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF						
	a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman diberikan	10	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman diberikan	5	5.00	4.00	4.00	4.00	3.00
	c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah	5	3.0	0.0	1.5	0.5	0
	d. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang diberikan	5	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
3	MANAJEMEN						
	a. Manajemen Umum	3	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75
	b. Manajemen Kelembagaan	3	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	c. Manajemen permodalan	3	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40
	d. Manajemen Aktiva	3	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
	e. Manajemen Likuiditas	3	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40
4	EFISIENSI						
	a. Rasio Beban Operasi Anggota atas Partisipasi	4	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00

	Bruto						
	b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor	4	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	c. Rasio Efisiensi Pelayanan	2	2.00	2.00	2.00	2.00	1.5
5	LIKUIDITAS						
	a. Rasio Kas Bank terhadap kewajiban lancar	10	1.00	2.50	2.50	2.50	2.50
	b. Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang diterima	5	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
6	KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN						
	a. Rentabilitas Asset	3	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
	b. Rentabilitas Modal Sendiri	3	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
	c. Kemandirian Operasional Pelayanan	4	0	0	0	0	0
7	JATIDIRI KOPERASI						
	a. Rasio Partisipasi Bruto	7	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25
	b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)	3	3.00	3.00	2.5	2.5	0.0
	Skor Akhir	100	72.40	70.50	69.10	68.70	62.70

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 komponen sebagaimana dimaksud pada angka 1 s/d 7, diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi yang dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus. Penetapan predikat tingkat kesehatan KPRI Ikhwan Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 87
Tolak Ukur Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP

Skor	PREDIKAT
$80 \leq X < 100$	SEHAT
$66 \leq X < 80$	CUKUP SEHAT
$51 \leq X < 66$	DALAM PENGAWASAN
< 51	DALAM PENGAWASAN KHUSUS

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Tabel 4. 88
Penetapan Kesehatan KPRI Ikhwan
Tahun 2012-2016

Tahun	Skor	Predikat
2012	72.40	CUKUP SEHAT
2013	70.50	CUKUP SEHAT
2014	69.10	CUKUP SEHAT
2015	68.70	CUKUP SEHAT
2016	62.70	DALAM PENGAWASAN

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

Berdasarkan hasil penilaian kesehatan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Ikhwan Kota Payakumbuh yang peneliti lakukan maka kesehatan koperasi pada tahun 2012-2015, koperasi ini memperoleh predikat Cukup sehat, pada tahun 2016 memperoleh predikat Dalam Pengawasan.

Dari tabel 4.86 terlihat bahwa pada tahun 2015-2016 dapat diberikan analisis penilaian tingkat kesehatan dari 7 aspek penilaian tingkat kesehatan koperasi terhadap USP KPRI Ikhwan Kota Payakumbuh sebagai berikut :

1. Aspek Permodalan Koperasi :
 - a. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Asset pada tahun 2012-2013 sudah mencapai skor maksimal mencapai 6.00 dan dapat dikatakan sehat. Sedangkan pada tahun 2014-2015 masih jauh dari skor maksimal bahkan mencapai 3.00, sedangkan pada tahun 2016 sangat rendah hanya mencapai skor 1.50. sedangkan skor maximal yang diharapkan adalah 6.00. dengan demikian koperasi harus meningkatkan modal sendiri guna mencapai kualitas dengan maximal. Pada tahun 2014 -2016 belum dapat dikatakan sehat dikarenakan belum mencapai skor maximal.
 - b. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan Yang Beresiko belum mendekati pencapaian skor yang maximal sehingga mempengaruhi skor akhir koperasinya, ini berarti

bahwa jumlah modal sendiri belum mencukupi untuk menanggulangi pinjaman bersih. Dan Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan Yang Beresiko tidak sehat dikarenakan belum mencapai skor maksimal yaitu 6.00.

- c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri sudah mencapai skor maksimal sebab secara keseluruhan jumlah modal sendiri tertimbang terhadap ATMR sudah mengalami peningkatan yang baik tiap tahunnya, dan rasio tersebut sudah dapat dikatakan sehat dikarenakan sudah mencapai skor maksimal yaitu 3.00.

2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif

- a. Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota Terhadap Volume Pinjaman sudah mencapai skor maksimal dalam penilaiannya, sebab persentase rasio sudah mencapai 100% setiap tahunnya dengan meraih skor 10.00 dan merupakan skor maksimal. Hal ini berarti bahwa dalam aktivitas unit simpan pinjam kepada anggota pada tahun 2012-2016 dapat dikatakan tinggi. Karena semua pinjaman telah diberikan kepada seluruh anggota. Dan rasio tersebut sudah dapat dikatakan sehat dikarenakan sudah mencapai skor maksimal yaitu 10.00.
- b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Yang Diberikan belum mencapai skor maksimal didalam rasio ini adanya ditemukan pinjaman bermasalah dalam laporan keuangannya, ini berarti pengelolaannya belum baik dan harus ditingkat lebih baik lagi untuk tahun berikutnya. Dan rasio ini dapat dikatakan sehat pada tahun 2012 yang mencapai skor maksimal, sedangkan untuk tahun berikutnya belum dapat dikatakan sehat dikarenakan masih jauh dari skor maksimal yaitu 5.00.

- c. Rasio Cadangan Resiko Terhadap Pinjaman Bermasalah rasio ini belum dapat dikatakan sehat dikarenakan skor yang dicapai masih jauh dari skor maksimal yaitu 5.00.
 - d. Rasio Pinjaman Yang Beresiko Terhadap Pinjaman Yang Diberikan dalam rasio ini skor yang diperoleh masih jauh dari skor maksimal, rasio ini belum dapat dikatakan sehat dikarenakan belum mencapai skor maksimal yaitu 5.00.
3. Aspek Manajemen
- a. Dari Aspek Manajemen Umum Koperasi skornya belum dapat dikatakan sehat dikarenakan belum mencapai skor maksimal yaitu 3.00.
 - b. Dari Aspek Manajemen Kelembagaan sudah mencapai skor maksimal 3.00 dan ini berarti dalam manajemen kelembagaan sudah baik dan harus dipertahankan untuk tahun berikutnya, dan rasio dapat dikatakan sehat dikarenakan sudah mencapai skor maksimal yaitu 3.00.
 - c. Dari Aspek Manajemen Permodalan masih jauh dari skor maksimal, perlu peningkatan tingkat pertumbuhan modal sendiri dan peningkatan tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota. Dan rasio belum dapat dikatakan sehat dikarenakan belum mencapai skor maksimal yaitu 3.00.
 - d. Dari Aspek Manajemen Aktiva masih sangat jauh dari skor maksimal, ini berarti masih minimnya pinjaman, perlunya cadangan penghapusan piutang dan perlunya prinsip kehati-hatian dalam pemberi pinjaman. Dan rasio ini belum dapat dikatakan sehat dikarenakan belum mencapai skor maksimal yaitu 3.00.
 - e. Dari Aspek Manajemen Likuiditas masih jauh dari skor maksimal, ini berarti koperasi harus memiliki kebijaksanaan tertulis mengenai pengendalian likuiditas dan memiliki system informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan

likuiditasnya. Dan rasio ini belum dapat dikatakan sehat dikarenakan belum mencapai skor maksimal yaitu 3.00.

4. Aspek Efisiensi

- a. Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto dalam rasio ini sudah mencapai nilai skor maksimal yaitu dengan nilai skor 4.00. hal ini berarti bahwa koperasi telah memberikan efisiensi pelayanan kepada para anggotanya dari penggunaan asset yang dimiliki. Partisipasi bruto yang tinggi menunjukkan bahwa kontribusi anggota terhadap koperasi juga tinggi dan meningkatkan perolehan SHU. Diharapkan pihak koperasi mempertahankan untuk tahun berikutnya. Dan rasio ini sudah dapat dikatakan sehat dikarenakan sudah mencapai skor maksimal yaitu 4.00.
- b. Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor dalam rasio ini pada tahun 2012 - 2016 sudah mencapai skor maksimal 4.00. dan sudah dapat dikatakan sehat dikarenakan sudah mencapai skor maksimal yaitu 4.00.
- c. Rasio Efisiensi Pelayanan pada tahun 2012-2015 sudah mencapai skor maksimal 2.00, dan dapat dikatakan sehat. Sedangkan pada tahun 2016 belum mencapai skor maksimal dan belum dapat dikatakan sehat dikarenakan belum mencapai skor maksimal yaitu 2.00.

5. Aspek Likuiditas

- a. Rasio Kas Dan Bank Terhadap Kewajiban Lancar belum mencapai skor maksimal sebab skor yang dicapai sangat rendah, padahal dalam peraturan skor maksimalnya 10.00. hal ini berarti rasio kas masih belum baik. Untuk meningkatkan kas atau mengurangi kewajiban lancar sebab jika kas terlalu tinggi atau terlalu rendah maka rasio penilaian koperasi yang dimiliki akan mendapat skor minimum oleh sebab itu antara total kas dan kewajiban lancar seharusnya tidak terlalu tinggi

dan tidak terlalu rendah untuk meraih skor maksimal. Dan rasio ini belum dapat dikatakan sehat dikarenakan belum mencapai skor maximal yaitu 10.00.

- b. Rasio Pinjaman Yang Diberikan Terhadap Dana Yang Diterima sudah mencapai skor maksimal, ini berarti bahwa sudah terpenuhinya peningkatan pinjaman yang diberikan dan diiringi dengan dana yang diterima. Dan rasio sudah sehat dikarenakan sudah mencapai skor maximal yaitu 5.00.

6. Aspek Kemandirian Dan Pertumbuhan

- a. Rasio Rentabilitas Asset belum mencapai skor maksimal pada tahun 2012-2016 hanya memiliki skor 0.75, skor maksimal yang harus diperoleh yaitu 3.00. hal ini berarti rentabilitas asset koperasi dalam kondisi kemampuan menghasilkan SHU masih rendah. Diharapkan pihak koperasi mampu meningkatkan perolehan SHU sebelum pajak. Dan rasio tidak sehat dikarenakan belum mencapai skor maximal yaitu 3.00.
- b. Rentabilitas Modal Sendiri sudah mencapai skor maksimal pada tahun 2012-2016, hal ini berarti rentabilitas modal sendiri koperasi sudah dalam kondisi baik. Dan rasio ini sudah dapat dikatakan sehat dikarenakan sudah mencapai skor maximal yaitu 3.00.
- c. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan belum mencapai skor maksimal dari tahun 2012-2016 dengan skornya 4.00, ini berarti partisipasi netto koperasi belum baik. Dan diharapkan kepada pihak koperasi untuk mempertahankan tahun berikutnya. Dan rasio ini belum dapat dikatakan sehat dikarenakan belum mencapai skor maximal yaitu 4.00.

7. Aspek Jatidiri Koperasi

- a. Rasio Partisipasi Bruto pada tahun 2012-2016 belum mencapai skor maksimal dan rasi ini tidak sehat dikarenakan belum mencapai skor maksimal yaitu 7.00.
- b. Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota pada tahun 2012-2013 sudah dapat dikatakan sehat dikarenakan sudah mencapai skor maksimal yaitu 3.00. sedangkan pada tahun 2014 – 2016 belum dapat dikatakan sehat dikarenakan belum mencapai skor maksimal.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana tingkat kesehatan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) kota payakumbuh dengan menggunakan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6.IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Berdasarkan pengolahan data keuangan yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

8. Aspek Permodalan Koperasi :

d. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Asset pada tahun 2012-2013 sudah mencapai skor maksimal mencapai 6.00 dan dapat dikatakan sehat. Sedangkan pada tahun 2014-2015 masih jauh dari skor maksimal bahkan mencapai 3.00, sedangkan pada tahun 2016 sangat rendah hanya mencapai skor 1.50. sedangkan skor maximal yang diharapkan adalah 6.00. dengan demikian koperasi harus meningkatkan modal sendiri guna mencapai kualitas dengan maximal. Pada tahun 2014 -2016 belum dapat dikatakan sehat dikarenakan belum mencapai skor maximal.

e. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan Yang Beresiko belum mendekati pencapaian skor yang maximal sehingga mempengaruhi skor akhir koperasinya, ini berarti bahwa jumlah modal sendiri belum mencukupi untuk menanggulangi pinjaman bersih. Dan Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan Yang Beresiko tidak sehat dikarenakan belum mencapai skor maximal yaitu 6.00.

- f. Rasio Kecukupan Modal Sendiri sudah mencapai skor maksimal sebab secara keseluruhan jumlah modal sendiri tertimbang terhadap ATMR sudah mengalami peningkatan yang baik tiap tahunnya, dan rasio tersebut sudah dapat dikatakan sehat dikarenakan sudah mencapai skor maksimal yaitu 3.00.
9. Aspek Kualitas Aktiva Produktif
- e. Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota Terhadap Volume Pinjaman sudah mencapai skor maksimal dalam penilaiannya, sebab persentase rasio sudah mencapai 100% setiap tahunnya dengan meraih skor 10.00 dan merupakan skor maksimal. Hal ini berarti bahwa dalam aktivitas unit simpan pinjam kepada anggota pada tahun 2012-2016 dapat dikatakan tinggi. Karena semua pinjaman telah diberikan kepada seluruh anggota. Dan rasio tersebut sudah dapat dikatakan sehat dikarenakan sudah mencapai skor maksimal yaitu 10.00.
 - f. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Yang Diberikan belum mencapai skor maksimal didalam rasio ini adanya ditemukan pinjaman bermasalah dalam laporan keuangannya, ini berarti pengelolaannya belum baik dan harus ditingkat lebih baik lagi untuk tahun berikutnya. Dan rasio ini dapat dikatakan sehat pada tahun 2012 yang mencapai skor maksimal, sedangkan untuk tahun berikutnya belum dapat dikatakan sehat dikarenakan masih jauh dari skor maksimal yaitu 5.00.
 - g. Rasio Cadangan Resiko Terhadap Pinjaman Bermasalah rasio ini belum dapat dikatakan sehat dikarenakan skor yang dicapai masih jauh dari skor maksimal yaitu 5.00.
 - h. Rasio Pinjaman Yang Beresiko Terhadap Pinjaman Yang Diberikan dalam rasio ini skor yang diperoleh masih jauh dari skor maksimal, rasio ini belum dapat dikatakan sehat dikarenakan belum mencapai skor maksimal yaitu 5.00.

10. Aspek Manajemen

- f. Dari Aspek Manajemen Umum Koperasi skornya belum dapat dikatakan sehat dikarenakan belum mencapai skor maksimal yaitu 3.00.
- g. Dari Aspek Manajemen Kelembagaan sudah mencapai skor maksimal 3.00 dan ini berarti dalam manajemen kelembagaan sudah baik dan harus dipertahankan untuk tahun berikutnya, dan rasio dapat dikatakan sehat dikarenakan sudah mencapai skor maksimal yaitu 3.00.
- h. Dari Aspek Manajemen Permodalan masih jauh dari skor maksimal, perlu peningkatan tingkat pertumbuhan modal sendiri dan peningkatan tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota. Dan rasio belum dapat dikatakan sehat dikarenakan belum mencapai skor maksimal yaitu 3.00.
- i. Dari Aspek Manajemen Aktiva masih sangat jauh dari skor maksimal, ini berarti masih minimnya pinjaman, perlunya cadangan penghapusan piutang dan perlunya prinsip kehati-hatian dalam pemberi pinjaman. Dan rasio ini belum dapat dikatakan sehat dikarenakan belum mencapai skor maksimal yaitu 3.00.
- j. Dari Aspek Manajemen Likuiditas masih jauh dari skor maksimal, ini berarti koperasi harus memiliki kebijaksanaan tertulis mengenai pengendalian likuiditas dan memiliki system informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditasnya. Dan rasio ini belum dapat dikatakan sehat dikarenakan belum mencapai skor maksimal yaitu 3.00.

11. Aspek Efisiensi

- d. Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto dalam rasio ini sudah mencapai nilai skor maksimal yaitu dengan nilai skor 4.00. hal ini berarti bahwa koperasi telah memberikan efisiensi pelayanan kepada para anggotanya dari penggunaan asset yang dimiliki. Partisipasi bruto yang tinggi menunjukkan bahwa

kontribusi anggota terhadap koperasi juga tinggi dan meningkatkan perolehan SHU. Diharapkan pihak koperasi mempertahankan untuk tahun berikutnya. Dan rasio ini sudah dapat dikatakan sehat dikarenakan sudah mencapai skor maksimal yaitu 4.00.

- e. Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor dalam rasio ini pada tahun 2012 - 2016 sudah mencapai skor maksimal 4.00. dan sudah dapat dikatakan sehat dikarenakan sudah mencapai skor maksimal yaitu 4.00.
- f. Rasio Efisiensi Pelayanan pada tahun 2012-2015 sudah mencapai skor maksimal 2.00, dan dapat dikatakan sehat. Sedangkan pada tahun 2016 belum mencapai skor maksimal dan belum dapat dikatakan sehat dikarenakan belum mencapai skor maksimal yaitu 2.00.

12. Aspek Likuiditas

- c. Rasio Kas Dan Bank Terhadap Kewajiban Lancar belum mencapai skor maksimal sebab skor yang dicapai sangat rendah, padahal dalam peraturan skor maksimalnya 10.00. hal ini berarti rasio kas masih belum baik. Untuk meningkatkan kas atau mengurangi kewajiban lancar sebab jika kas terlalu tinggi atau terlalu rendah maka rasio penilaian koperasi yang dimiliki akan mendapat skor minimum oleh sebab itu antara total kas dan kewajiban lancar seharusnya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah untuk meraih skor maksimal. Dan rasio ini belum dapat dikatakan sehat dikarenakan belum mencapai skor maksimal yaitu 10.00.
- d. Rasio Pinjaman Yang Diberikan Terhadap Dana Yang Diterima sudah mencapai skor maksimal, ini berarti bahwa sudah terpenuhinya peningkatan pinjaman yang diberikan dan diiringi dengan dana yang diterima. Dan rasio sudah sehat dikarenakan sudah mencapai skor maksimal yaitu 5.00.

13. Aspek Kemandirian Dan Pertumbuhan

- d. Rasio Rentabilitas Asset belum mencapai skor maksimal pada tahun 2012-2016 hanya memiliki skor 0.75, skor maksimal yang harus diperoleh yaitu 3.00. hal ini berarti rentabilitas asset koperasi dalam kondisi kemampuan menghasilkan SHU masih rendah. Diharapkan pihak koperasi mampu meningkatkan perolehan SHU sebelum pajak. Dan rasio tidak sehat dikarenakan belum mencapai skor maximal yaitu 3.00.
- e. Rentabilitas Modal Sendiri sudah mencapai skor maksimal pada tahun 2012-2016, hal ini berarti rentabilitas modal sendiri koperasi sudah dalam kondisi baik. Dan rasio ini sudah dapat dikatakan sehat dikarenakan sudah mencapai skor maximal yaitu 3.00.
- f. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan belum mencapai skor maksimal dari tahun 2012-2016 dengan skornya 4.00, ini berarti partisipasi netto koperasi belum baik. Dan diharapkan kepada pihak koperasi untuk mempertahankan tahun berikutnya. Dan rasio ini belum dapat dikatakan sehat dikarenakan belum mencapai skor maximal yaitu 4.00.

14. Aspek Jatidiri Koperasi

- c. Rasio Partisipasi Bruto pada tahun 2012-2016 belum mencapai skor maximal dan rasi ini tidak sehat dikarenakan belum mencapai skor maximal yaitu 7.00.
- d. Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota pada tahun 2012-2013 sudah dapat dikatakan sehat dikarenakan sudah mencapai skor maximal yaitu 3.00. sedangkan pada tahun 2014 – 2016 belum dapat dikatakan sehat dikarenakan belum mencapai skor maximal.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapatkan dari hasil analisis penilaian kinerja dan perkembangan kinerja USP KPRI Ikhwan Periode 2012-2016, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Saran dari penulis agar melakukan penilaian tingkat kesehatan KPRI Ikhwan setiap tahunnya dinilai dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk masa yang akan datang.
2. Peneliti menyarankan agar KPRI Ikhwan lebih selektif memilih kreditur dan menggunakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman sehingga dapat meminimalisir terjadinya piutang bermasalah.
3. Peneliti menyarankan agar koperasi KPRI Ikhwan Kota Payakumbuh dalam aspek manajemen sehendaknya adanya rencana kerja jangka panjang 3 tahun kedepan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Idrus, S. 2008, *Kinerja Manajer dan Bisnis Koperasi*, Malang: Malang Press
- Anoraga, P. Widiyanti, N. 2007, *Dinamika Koperasi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Hafulyon, 2010, *Dasar – Dasar Manajemen*, Batusangkar: STAIN Batusangkar Press
- Hendrajogi, 2010, *Koperasi Asas- Asas, Teori dan Praktik*, Jakarta: Rajawali Pers
- Herdi, H. Asyik, N. F. Amanah, L, 2013, *Kajian Tingkat Kesehatan Koperasi Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 14 Tahun 2000*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol.2 No. 10
- Kasmir, 2011, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers
- Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2012-2016 KPRI Ikhwan Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh
- Mahmudi, 2015, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Muis, A. 2009, *Koperasi dan perkembangannya di Indonesia (jurnal madani Edisi I)*
- Pachta, A. 2008, *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman Regulasi Pendidikan dan Modal Usaha*. Jakarta: Kencana
- Partomo, T. S, 2009, *Ekonomi Kooperasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06 /Per/Dep.6/Iv/2016, *Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi*
- Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 20 /Per/M. KUKM/XI/2008, *Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi*
- Poetra, S. Bambang, Setiady, A, 2007, *Koperasi Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta
- Rudianto, 2010, *Karakteristik Koperasi*, Jakarta: PT. Glora Aksara Pratama
- Solihin, I, 2009, *Pengantar Manajemen*, Jakarta : PT. Glora Aksara Pratama
- Sudarsono dan Edilius, 2010, *Koperasi Dalam Praktik Cetakan Kelima*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Usman, H, 2008, *Manajemen*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Widoatmodjo, S, 2009, *Pasar Modal Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia